

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan secara universal diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia dan termasuk salah satu instrumen dasar untuk meningkatkan kualitas hidup individu. Pendidikan meliputi segala bentuk usaha, pengaruh, perlindungan, serta bantuan yang diberikan kepada anak dengan tujuan membantu proses pendewasaannya. Pernyataan tersebut dimaksudkan bahwa melalui pendidikan anak-anak diharapkan akan memiliki keterampilan yang baik agar mampu menjalani kehidupannya secara mandiri. Keterampilan individu dalam menjalani kehidupannya turut serta dipengaruhi oleh kehadiran orang dewasa, maupun media-media yang diciptakan seperti buku, serta pengalaman hidup sehari-hari. Pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga sebagai alat untuk pemberdayaan, yang memungkinkan individu untuk berpartisipasi lebih penuh dalam kehidupan ekonomi, sosial, dan politik.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004, pendidikan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik melalui kegiatan pembelajaran.¹ Tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik agar berkembang menjadi individu yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, mampu mengendalikan diri, berkepribadian, cerdas, berakhlak mulia, serta terampil sehingga dapat berperan dengan baik sebagai anggota masyarakat maupun warga negara. Kelompok rentan adalah bagian dari masyarakat yang memiliki risiko lebih tinggi dalam menghadapi kesulitan untuk mendapatkan sumber daya, layanan publik, dan peluang sosial ekonomi dibandingkan kelompok lain. Yang termasuk dalam kelompok ini antara lain anak-anak, perempuan, lansia, penyandang disabilitas, serta orang-orang dengan kondisi ekonomi terbatas.

¹ Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78. Jakarta: Sekretariat Negara.

Lebih jauh lagi, kelompok rentan juga sering kali tidak dilibatkan dalam proses pembangunan karena minimnya akses dan kesempatan yang mereka miliki. Sementara itu, kelompok miskin menjadi bagian dari masyarakat yang paling merasakan tekanan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, mereka hanya memiliki dua pilihan dalam hal pendidikan, yaitu bersekolah di lembaga pendidikan formal dengan kualitas yang rendah atau tidak bersekolah sama sekali dan bekerja di sektor informal. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka rantai kemiskinan akan terus berlanjut hingga ke generasi selanjutnya.

Keluarga miskin adalah salah satu bentuk nyata kehadiran kelompok rentan di masyarakat. Kelompok miskin adalah bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam pemenuhan kebutuhan dasar, baik berupa pangan, sandang, papan, pendidikan, maupun kesehatan. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap layanan publik, keterpinggiran sosial, dan rendahnya kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup. Kemiskinan bukanlah kondisi yang berdiri sendiri, melainkan hasil dari permasalahan yang kompleks. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi oleh ketersediaan lapangan kerja, yang berdampak pada peningkatan angka pengangguran dan kemiskinan. Selain itu, distribusi pendapatan rumah tangga yang tidak merata juga menjadi faktor krusial. Kesenjangan ini menyebabkan kelompok masyarakat dengan sumber daya terbatas akan cenderung berada di bawah garis kemiskinan.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), *Human Development Index* Indonesia pada tahun 2024 mencapai nilai 75,02 dalam skala IPM nasional, meningkat dari 74,39 pada 2023, atau naik sekitar 0,85 persen. Peningkatan ini ditopang oleh semua dimensi pengukuran HDI, khususnya dimensi umur panjang dan sehat, dimensi pengetahuan (tahun sekolah), dan dimensi layak hidup. Data BPS 2024 mencatat angka harapan lama sekolah mencapai 13,27 tahun dan rata-rata lama sekolah 8,89

tahun, yang turut mengangkat skor HDI nasional.² Secara global, dalam laporan terbaru UNDP atau *United Nations Development Programme*, Indonesia menduduki peringkat ke-113 dari 193 negara dalam laporan *Human Development Report 2025*, dengan nilai HDI sebesar 0,728, dan masuk kategori *high human development*. Namun posisi ini berada jauh dibawah negara-negara kawasan ASEAN seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam.³

Gambar 1. 1 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Jawa Barat, 2024

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI	98,53	102,99
SMP/MTs	84,61	95,60
SMA/SMK/MA	60,68	80,56

(Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut). Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama.

² Badan Pusat Statistik. (2024). *Indikator Pendidikan 2024*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/22/c20eb87371b77ee79ea1fa86/statistik-pendidikan-2024.html> pada 23 September 2025.

³ UNDP. (2025). *UNDP, BAPPENAS And Den Host High-level Dialogue On AI And Human Development At The Launch Of Undp's 2025 Human Development Report*. Diakses dari <https://www.undp.org/indonesia/press-releases/undp-bappenas-and-den-host-high-level-dialogue-ai-and-human-development-launch-undps-2025-human-development-report> pada 23 September 2025.

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat di atas, Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI mencapai 98,53 persen, sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) tercatat 102,99 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia 7–12 tahun di Indonesia telah menempuh pendidikan dasar sesuai kelompok usianya. Nilai APK yang melebihi 100 persen menunjukkan adanya peserta didik yang masih berada pada tingkat SD/MI meski tidak termasuk usia ideal, karena masuk lebih awal maupun mengalami pengulangan kelas. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) masih kurang dari 2 persen menjadi pertanda masih ada sebagian kecil anak usia sekolah dasar yang belum terjangkau layanan pendidikan formal. Kondisi ini menjadi permasalahan yang harus segera ditangani, faktor-faktor tersebut meliputi keterbatasan akses di daerah terpencil, faktor ekonomi keluarga, maupun hambatan sosial budaya yang menghambat keikutsertaan anak di sekolah dasar.

Gambar 1. 2 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, 2022

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)	Angka Partisipasi Kasar (APK)
SD/MI/Sederajat	97,88	106,27
SMP/MTs/Sederajat	80,89	92,11
SMA/SMK/MA/Sederajat	61,97	85,49

(Sumber: Kemendikdasmen, 2022)

Berdasarkan data BPS Nasional, Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD/MI mencapai 97,88 persen, sementara Angka Partisipasi Kasar (APK) tercatat 106,27 persen. APK yang melampaui APM menjadi salah satu nilai merah bagi kebijakan pemerintah. Karena ada indikasi bahwa lebih banyak anak yang mengulang kelas maupun putus sekolah lalu melanjutkan pendidikan, dibandingkan anak-anak yang bersekolah sesuai kategori usianya (7-12 tahun). Isu tersebut menandakan bahwa akses pendidikan belum sepenuhnya menjangkau seluruh kelompok masyarakat. Mereka yang pernah putus sekolah mungkin dihadapi dengan permasalahan ekonomi yang memaksanya berhenti untuk sekolah untuk sementara. Selain akses pendidikan, peningkatan sarana prasarana serta kualitas

mutu pendidikan harus berjalan beriringan, agar pendidikan dasar tidak hanya merata tetapi juga berkualitas.

Meskipun pendidikan di Indonesia secara konstitusional dijamin sebagai hak dasar setiap warga negara. Namun dalam praktiknya, akses pendidikan masih berpegang erat pada kondisi ekonomi keluarga. Sejak tahun 1990-an, pengaruh neoliberalisme mulai masuk ke berbagai sektor, termasuk pendidikan. Sehingga layanan pendidikan semakin dipandang sebagai barang yang diperjualbelikan. Artinya, semakin tinggi biaya pendidikan yang dikeluarkan, maka semakin tinggi jaminan kualitas yang didapat. Akibatnya, kondisi ini membuat pemenuhan hak atas pendidikan menjadi tidak merata. Keluarga dengan ekonomi terbatas seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya, yang turut serta berdampak pada ketidakmampuan membayar biaya pendidikan yang layak.

Berdasarkan hasil studi literatur ditemukan bahwa biaya pendidikan tidak hanya seputar pada iuran sekolah, keluarga tetap harus menanggung biaya seragam, buku, transportasi, hingga pemenuhan gizi anak agar mampu belajar secara optimal. Bagi rumah tangga miskin, pengeluaran ini menjadi beban berat yang memicu terjadinya anak untuk putus sekolah atau bekerja demi menambah pendapatan keluarga. Dalam usahanya, pemerintah telah mengupayakan berbagai kebijakan untuk memperluas akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin. Program seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Anak dari Kementerian Sosial dirancang untuk meringankan beban biaya sekolah dan menjamin keberlanjutan pendidikan dasar. Namun, skala persoalan yang dihadapi terlalu besar untuk ditangani pemerintah semata. Keterbatasan anggaran, tantangan pendataan, serta distribusi bantuan yang tidak selalu merata menimbulkan kesenjangan antara kebijakan dan realitas lapangan.

Berangkat dari permasalahan tersebut, terbentuklah berbagai organisasi sipil sosial yang fokus pada peningkatan kualitas SDM melalui jalur pendidikan. Ketika negara belum sepenuhnya mampu memenuhi tanggung jawab dalam menjamin pendidikan gratis dan berkualitas bagi seluruh warga, kelompok masyarakat mengambil inisiatif dengan membentuk sekolah komunitas, pusat belajar alternatif, maupun melalui program beasiswa swadaya. Inisiatif tersebut

hadir sebagai wujud solidaritas sosial untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin tidak tertinggal dalam proses pembangunan manusia. Salah satu organisasi sosial yang turut berpartisipasi dalam peningkatan akses pendidikan keluarga miskin adalah Yayasan Harapan Robbani.

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa Yayasan Harapan Robbani memulai perjalanannya sebagai lembaga tradisional dengan mulai merintis kegiatan sosial berbasis kepedulian terhadap anak yatim dan dhuafa di Lingkungan Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan sosialnya berupa pemberian santunan dan sembako secara rutin melalui unit Departemen Sosial Graha Yatim dan Dhuafa (GRAY). Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2021 yayasan mengalami perkembangan menjadi institusi yang lebih profesional, ditandai dengan dibentuknya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Pembentukan LKSA sebagai tempat tinggal anak asuh bertujuan agar program yang dijalankan dapat tercapai secara efektif.

Pada tahun 2025, Yayasan Harapan Robbani memasuki tahap sebagai institusi modern dengan memperoleh status hukum sebagai Lembaga Amil Zakat Provinsi (LAZPROV). Transformasi ini dapat dilihat sebagai pengakuan resmi terhadap kredibilitas dan profesionalitas yayasan dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah. Dengan status tersebut, yayasan memiliki legitimasi yang lebih kuat dalam menjalankan program-program sosial, termasuk program beasiswa pendidikan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Selain itu, permasalahan akses pendidikan tidak hanya dapat dipahami sebagai persoalan individu, tetapi juga sebagai persoalan sistem sosial yang melibatkan berbagai aktor dan institusi.

Dalam perspektif Talcott Parsons, suatu sistem sosial dapat berjalan dengan baik apabila mampu memenuhi empat fungsi pokok yang dikenal dengan skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*). Keempat fungsi tersebut saling berkaitan dalam menjaga keberlangsungan dan keseimbangan suatu sistem sosial, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan bagi kelompok rentan. Program beasiswa pendidikan yang dijalankan oleh Yayasan Harapan Robbani tidak dapat dipahami hanya dari hasil akhirnya berupa meningkatnya akses pendidikan anak asuh, melainkan penting untuk melihat proses bagaimana sebuah

organisasi mampu beradaptasi ditengah kondisi masyarakat yang dinamis. Kemampuan Yayasan Harapan Robbani dalam menghimpun dan mengelola dana, membangun koordinasi serta menjaga kepercayaan publik, hingga melaksanakan pembinaan karakter, kedisiplinan, dan nilai-nilai keagamaan sebagai bagian dari proses pendidikan, menjadi cerminan implementasi Skema AGIL yang digagas oleh Talcott Parsons. Keempat fungsi tersebut merupakan satu kesatuan yang menentukan keberhasilan program dalam menciptakan perubahan sosial.

Dukungan Yayasan Harapan Robbani terhadap akses pendidikan tidak hanya terbatas pada pembiayaan iuran sekolah, tetapi juga mencakup peningkatan kualitas belajar anak melalui kegiatan pendampingan, bimbingan belajar, serta pembinaan karakter. Pembinaan karakter menjadi salah satu fondasi penting karena permasalahan anak dari kelompok rentan ini tidak hanya terbatas pada beban biaya pendidikan, tetapi juga kurangnya dukungan positif dari lingkungan tempat tinggal yang berdampak pada perkembangan mental anak. Anak-anak asuh dibina agar memiliki motivasi untuk belajar dan berkembang, sehingga potensi dan kemampuan dalam dirinya dapat tumbuh secara optimal dan terarah. Adapun urgensi dalam penelitian ini adalah mengkaji bagaimana program beasiswa pendidikan yang diberikan oleh GRAY Yayasan Harapan Robbani berkontribusi terhadap meningkatnya akses pendidikan anak-anak dari keluarga miskin, dalam hal ini yaitu anak yatim piatu dan dhuafa.

1.2 Permasalahan Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu hak dasar setiap anak yang dijamin dalam konstitusi Indonesia. Pemerintah telah menerapkan sejumlah kebijakan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, termasuk bagi anak-anak yatim dan dhuafa yang tergolong dalam kelompok rentan. Seluruh anak Indonesia, dari berbagai latar belakang sosial dan ekonomi, berhak mendapatkan kesempatan yang setara untuk menempuh pendidikan sebagai fondasi menggapai asa dan cita-cita. Pendidikan juga termasuk investasi jangka panjang, dan setiap individu diharapkan dapat berkontribusi terhadap pembangunan negara. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan layak diharapkan tumbuh menjadi generasi yang cerdas, mandiri, dan

berwawasan luas sehingga tidak ada lagi generasi tertinggal di masa yang akan datang.

Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan, masih banyak anak dari kelompok miskin yang kesulitan mengakses pendidikan formal. Banyak dari mereka yang mengalami keterbatasan akses pendidikan akibat kondisi ekonomi keluarga yang lemah, kurangnya dukungan lingkungan, hingga minimnya fasilitas pendidikan yang memadai. Dampak dari kondisi tersebut membuat sebagian anak dari kelompok miskin harus putus sekolah atau tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Pemerintah memang telah berupaya memberikan bantuan melalui berbagai program, tetapi keterbatasan anggaran dan sumber daya membuat implementasi program belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan.

Berdasarkan kondisi tersebut, terbentuklah banyak organisasi sipil sosial yang turut serta menjadi aktor perubahan guna tercapainya keadilan sosial. Yayasan Harapan Robbani melalui Graha Yatim dan Dhuafa (GRAY) berusaha memenuhi komitmennya sebagai organisasi yang bergerak di bidang pemberdayaan sosial, pendidikan, hingga ekonomi melalui sejumlah program yang ditetapkan. Urgensi dalam penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kontribusi Graha Yatim dan Dhuafa (GRAY) terhadap akses pendidikan bagi anak-anak asuhannya melalui Program Beasiswa Pendidikan. Secara khusus, penelitian ini akan menelaah bagaimana program tersebut mampu membuka kesempatan pendidikan bagi anak-anak penerima manfaat.

Selain itu, peneliti juga memberikan uraian mendalam mengenai upaya keberlanjutan program beasiswa pendidikan yang dilakukan oleh pengurus GRAY Yayasan Harapan Robbani agar dapat menjangkau lebih banyak anak dari kelompok rentan. Skema AGIL relevan digunakan sebagai pisau analisis karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana Program Beasiswa Pendidikan GRAY Yayasan Harapan Robbani dijalankan sebagai sebuah sistem sosial yang saling terintegrasi. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi bentuk bantuan pendidikan yang diberikan, tetapi juga

menyajikan mekanisme kelembagaan, pola hubungan aktor yang terlibat, serta proses pembinaan yang mendukung keberhasilan program dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Program Beasiswa Pendidikan GRAY Yayasan Harapan Robbani dapat berkontribusi terhadap akses pendidikan?
2. Bagaimana Skema “AGIL” Oleh Talcott Parsons Diterapkan Dalam Pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan ?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan mengenai kontribusi Graha Yatim dan Dhuafa (GRAY) Yayasan Harapan Robbani dalam memperluas akses pendidikan bagi anak dari kelompok miskin melalui program beasiswa pendidikan.
2. Mendeskripsikan hasil analisis kajian menggunakan Skema “AGIL” oleh Talcott Parsons dalam pelaksanaan program beasiswa pendidikan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat:

Secara Teoritis:

1. Memberikan kontribusi bidang kajian Sosiologi Perencanaan Sosial melalui studi program beasiswa pendidikan.
2. Menambah referensi kajian tentang peran organisasi sosial dalam bidang kajian *Civil Society* dan Pembangunan, melalui studi Graha Yatim dan Dhuafa (GRAY) Yayasan Harapan Robbani, dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari kelompok miskin.

Secara Praktis:

1. Bagi Yayasan Harapan Robbani - Graha Yatim dan Dhuafa: menjadi masukan yang membangun dalam mengevaluasi dan meningkatkan

efektivitas program bantuan pendidikan formal yang telah berjalan. Temuan penelitian diharapkan dapat membantu yayasan dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk penggalangan dana, distribusi sumber daya, serta meningkatkan hubungan kemitraan dengan donatur.

2. Bagi Pemerintah: Temuan dari penelitian ini menyajikan data dan analisis yang dapat bermanfaat bagi pemerintah, dalam menyusun kebijakan yang lebih terpadu. Dengan memahami peran dan kontribusi salah satu organisasi sosial, pemerintah dapat mengoptimalkan alokasi sumber daya dan memperluas jangkauan program bantuan pendidikan bagi kelompok miskin.
3. Bagi Masyarakat: Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan Harapan Robbani GRAY, serta menumbuhkan kesadaran akan tanggung jawab sosial bersama.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti selanjutnya: Penelitian ini dapat menjadi acuan studi-studi selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam terkait akses pendidikan formal, pendidikan anak dari kelompok miskin, serta pengelolaan organisasi sosial di Indonesia.

1.5 Tinjauan Pustaka

Skema 1. 1 Peta Literatur Sejenis



(Sumber: Dikelola oleh Peneliti, 2025)

Penelitian dengan topik pemerataan akses pendidikan saat ini bukanlah yang pertama. Dilansir dari berbagai rujukan dan halaman jurnal, terdapat banyak penelitian terdahulu yang mengambil fokus penelitiannya yang sama. **Pertama**, penelitian oleh Recy Harviani Zurwanty, dkk. berjudul “*Akses Pendidikan Anak Keluarga Miskin Di Sungai Pisang Kota Padang*)” yang dimuat dalam *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research* mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya akses pendidikan anak dari keluarga miskin serta peran program bantuan pendidikan melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya akses pendidikan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, rendahnya persepsi orang tua terhadap pentingnya pendidikan, serta kurangnya kemauan belajar anak. Dampaknya antara lain pernikahan usia dini, pola pikir belum dewasa, kecemburuan sosial, dan lambatnya kemajuan daerah.

Namun demikian, terdapat upaya dari orang tua dan masyarakat seperti memberikan perhatian dan nasehat, meningkatkan daya tarik kegiatan sekolah, melengkapi sarana prasarana, serta memperbaiki akses jalan.⁴ **Kedua**, penelitian oleh Dewi Aswita Br Siagian berjudul “*Evaluasi Dampak Program Bantuan Pendidikan di Sekolah Bagi Anak Miskin dan Kurang Mampu di Labuhanbatu*” menilai sejauh mana program bantuan pendidikan mampu meningkatkan akses dan kualitas pembelajaran anak-anak dari keluarga miskin. Temuan penelitian didasarkan pada tiga dampak utama: kenaikan kehadiran siswa sekitar 15 %, peningkatan prestasi akademik berkat sarana belajar yang lebih baik, dan berkurangnya tekanan ekonomi keluarga karena terbantu biaya pendidikan.

Hasil analisis menyatakan bahwa dukungan finansial yang tepat sasaran tidak hanya membuka akses ke sekolah tetapi juga meningkatkan semangat belajar. Relevansi dengan penelitian ini terletak pada data empiris bahwa bantuan langsung berbasis sekolah efektif menekan hambatan biaya dan memperkuat keberlangsungan pendidikan anak.⁵ **Ketiga**, penelitian oleh Okta Rosfiani dkk,

⁴ Zurwanty, RH, Indra, N., & Sari, VP (2023). *Akses Pendidikan Anak Keluarga Miskin (Di Sungai Pisang Kota Padang)*. Inovatif: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial. Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Hlm. 830-838.

⁵ Siagian, DA (2024). *Evaluasi Dampak Program Bantuan Pendidikan di Sekolah Bagi Anak Miskin dan Kurang Mampu di Labuhanbatu*. Jurnal Edukatif. Hlm. 143-149.

berjudul “*Efektivitas Program Bantuan Siswa Miskin Dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa (Studi Kasus di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Inayah)*” yang dimuat dalam Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang menyoroti efektivitas Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) melalui pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BSM memberikan dampak positif dalam meringankan beban ekonomi keluarga dan meningkatkan motivasi belajar siswa, yang ditandai dengan meningkatnya kehadiran dan menurunnya angka putus sekolah.

Namun, peningkatan prestasi akademik tidak terlalu signifikan karena dipengaruhi oleh faktor lain seperti kualitas pembelajaran di sekolah, dukungan orang tua, dan kondisi lingkungan belajar. Temuan ini menunjukkan bahwa bantuan pendidikan efektif dalam mendukung keberlanjutan pendidikan, tetapi belum cukup kuat dalam meningkatkan capaian akademik secara signifikan.⁶ **Keempat**, penelitian oleh Eko Riyanto dkk berjudul “*Program Kesejahteraan Sosial Melalui Beasiswa Pendidikan Anak Yatim di Pesantren AL BINAA IBS Bekasi*” yang dimuat dalam Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam Universitas Muhammadiyah Surabaya menyoroti pelaksanaan program beasiswa sebagai bentuk pemberdayaan anak yatim melalui pendekatan kesejahteraan sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan fokus pada peran lembaga sosial dalam menyediakan akses pendidikan dan pembinaan berkelanjutan bagi anak yatim.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program beasiswa di AL BINAA IBS berjalan efektif melalui integrasi pendidikan formal (SD hingga SMA) dengan sistem pesantren. Selain itu, program ini juga mencakup pembinaan menyeluruh seperti penguatan ibadah, kemandirian, pelatihan komunikasi (muhadhoroh), pendampingan emosional, kegiatan kesehatan, serta aktivitas sosial dan spiritual. Program dimulai sejak usia dini untuk menjamin keberlangsungan pembinaan jangka panjang. Temuan ini sejalan dengan topik penelitian akses pendidikan bagi

⁶ Rosfiani, Okta. Azani, S. (2025). *Efektivitas Program Bantuan Siswa Miskin Dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-inayah)*. Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang 11. Hlm. 250-260..

anak keluarga miskin karena bantuan yang diberikan tidak hanya pendidikan formal, tetapi juga disertai pembinaan karakter anak-anak penerima manfaat.⁷

Kelima, penelitian oleh Muhammad Naufal dkk berjudul “*Pendidikan Formal Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru*” mengkaji bagaimana kondisi sosial ekonomi keluarga miskin mempengaruhi akses pendidikan formal anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan menemukan bahwa keterbatasan ekonomi menjadi faktor utama yang menyebabkan rendahnya partisipasi pendidikan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sekolah, serta munculnya tekanan psikologis pada anak. Dalam banyak kasus, orang tua dihadapkan pada dilema antara memenuhi kebutuhan sehari-hari atau mempertahankan keberlanjutan pendidikan anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pendidikan formal bagi anak dari kelompok rentan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, kemampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, serta lingkungan sosial yang kurang mendukung. Penelitian ini juga menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap anak yang seharusnya dapat diakses tanpa hambatan struktural. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada kesamaan fokus terhadap akses pendidikan bagi kelompok rentan serta penggunaan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam.⁸ Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar, yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan pada hambatan ekonomi sebagai faktor penghambat pendidikan, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada peran program bantuan pendidikan dalam meningkatkan akses tersebut.

Keenam, penelitian oleh Maulida Iffani dkk berjudul “*Akses Pendidikan Dasar Untuk Anak Keluarga Miskin di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul*” mengkaji bagaimana akses pendidikan dasar bagi anak dari keluarga

⁷ Riyanto, E., Mujahidin, E., & Tamam, A. M. (2022). *Program kesejahteraan sosial melalui beasiswa pendidikan anak yatim di Pesantren AL BINAA IBS Bekasi*. Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam. Hlm 52-63.

⁸ Ali, Muhammad. N. R., & Asriwandari, H. (2024). *Pendidikan formal anak pada keluarga miskin di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru*. Risoma: Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan. Hlm. 216-225.

miskin berkembang serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akses pendidikan dasar di Kecamatan Saptosari telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Akses tersebut didukung oleh peran orang tua maupun pemerintah, meskipun masih dihadapkan pada berbagai hambatan. Faktor-faktor seperti kondisi ekonomi, letak geografis, motivasi belajar, lingkungan sosial, serta budaya menjadi aspek penting yang dapat berfungsi sebagai pendukung sekaligus penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Selain itu, pemerintah berperan aktif melalui penyediaan fasilitas pendidikan serta bantuan pembiayaan bagi siswa dari keluarga miskin.

Di sisi lain, orang tua juga memberikan dukungan berupa pemenuhan kebutuhan pendidikan dan motivasi agar anak tetap bersekolah. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan terletak pada kesamaan fokus terhadap pemerataan akses pendidikan bagi kelompok rentan serta penggunaan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial secara mendalam.⁹ Penelitian ini juga sama-sama menyoroti pentingnya peran berbagai pihak dalam mendukung akses pendidikan. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar, yaitu penelitian ini lebih menitikberatkan pada peran eksternal seperti pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam mendukung akses pendidikan, sedangkan penelitian yang dilakukan lebih berfokus pada peran internal lembaga atau yayasan dalam menyediakan akses pendidikan.

Ketujuh, adapun penelitian sejenis lainnya yang berfokus pada peran organisasi sosial dalam meningkatkan akses pendidikan anak dari kelompok miskin yang sebelumnya telah dikaji oleh Nurul Widyarningsih berjudul “*Peran Panti Asuhan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Akses Pendidikan (Studi Pada 5 Anak Keluarga Miskin di Panti Asuhan Putra Nusa-Putra, Pejompongan, Jakarta Pusat)*” menunjukkan adanya transformasi fungsi panti asuhan sebagai lembaga sosial yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal, tetapi juga layanan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program akses pendidikan di panti

⁹ Iffani, M., & Pitoyo, A. J. (2021). *Akses Pendidikan Dasar Untuk Anak Keluarga Miskin Di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul*. Skripsi: Universitas Gadjah Mada. Hlm. 64-111.

asuhan sangat ditopang oleh partisipasi masyarakat yang konsisten, terutama melalui sumbangan rutin berupa uang, perlengkapan sekolah, hingga kebutuhan sehari-hari. Dukungan tersebut memungkinkan pihak panti memenuhi biaya pendidikan anak asuh secara berkelanjutan, mulai dari pembayaran sekolah, pembelian buku, seragam, hingga kebutuhan penunjang belajar lainnya.

Namun, terdapat kendala struktural dalam pelaksanaan program, yaitu ketidakseimbangan komposisi penerima manfaat. Jumlah anak dari keluarga miskin yang dibina di panti lebih banyak dibandingkan anak yatim piatu, padahal secara historis panti asuhan didirikan untuk menampung anak yatim. Kondisi ini menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi panti, dari yang semula berfokus pada pengasuhan anak yatim berubah menjadi lembaga sosial yang melayani anak dari keluarga tidak mampu secara umum.¹⁰ **Kedelapan**, penelitian serupa mengenai peran organisasi sosial oleh Zuhri M. Nawawi berjudul “*Peran Dompot Dhuafa Wasapada Dalam Memberikan Program Pendidikan Kepada Anak-Anak Kurang Mampu di Kota Medan*” yang dimuat dalam *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* mengkaji kontribusi lembaga non-pemerintah dalam membuka akses pendidikan melalui pemanfaatan dana ZISWAF.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Wasapada berperan signifikan dalam menyediakan akses pendidikan gratis melalui program seperti Sekolah Bintang Rabbani, Beasiswa Sukses, dan SMART Ekselensia yang didanai dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Program tersebut tidak hanya mencakup pendidikan formal dari tingkat dasar hingga menengah secara gratis, tetapi juga dilengkapi dengan fasilitas penunjang seperti asrama, perpustakaan, dan laboratorium, sehingga anak-anak dhuafa dapat belajar tanpa kendala biaya. Hasil temuan ini relevan dengan topik penelitian akses pendidikan anak dari keluarga miskin karena kajian penelitian bertumpu pada upaya organisasi sosial dalam memastikan keberlanjutan program bantuan pendidikan.¹¹ Penelitian **kesembilan**,

¹⁰ Widyaningsih, N. (2020). *Peran panti asuhan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial melalui program akses pendidikan (Studi pada 5 anak keluarga miskin di Panti Asuhan Putra Nusa-Putra, Pejompongan, Jakarta Pusat)*. Tesis: Universitas Negeri Jakarta.

¹¹ Nawawi, Z. & Nasution, F. (2022). *Peran Dompot Dhuafa Wasapada dalam memberikan program pendidikan kepada anak-anak kurang mampu di Kota Medan*. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Hlm. 277-282.

dilakukan oleh Abdi Rahmat dengan judul penelitian “*Gerakan Sosial dalam Aksi Penyelenggaraan Sekolah untuk Anak Miskin*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, serta menggunakan konsep Gerakan Sosial sebagai pisau analisis temuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Civil Society Organization* (CSO) berperan penting dalam penyelenggaraan sekolah bagi anak-anak miskin di wilayah yang tidak terjangkau layanan negara. Aksi pendidikan yang mereka lakukan berangkat dari keprihatinan terhadap kemiskinan struktural dan kekecewaan terhadap negara yang belum mampu memenuhinya. CSO dalam penelitian ini berfungsi sebagai aktor gerakan sosial dengan model *community-based organization* (CBO), yang dikelola sederhana dengan mengakar pada nilai voluntarisme religius serta jaringan sosial lokal hingga nasional.¹² Penelitian **kesepuluh**, dilakukan oleh Syafira Aulia dkk dengan judul “*Efektivitas Pengelolaan Dana Sosial Umat Yayasan Asy-syafi'iyah Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Di Dusun Rejosari Kelurahan Benowo*”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan konsep Pemberdayaan Sosial sebagai pisau analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Asy-Syafi'iyah mampu Dari sisi pendidikan, anak-anak yatim mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sekolah dan kebutuhan belajar. Dalam aspek kesehatan, mereka juga memperoleh perhatian yang membantu meningkatkan kondisi fisik dan kesejahteraan secara umum. Selain itu, program pengembangan keterampilan turut berperan dalam membangun kemandirian anak-anak, sehingga mereka memiliki bekal untuk masa depan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan dana, perlunya koordinasi yang lebih optimal dengan berbagai pihak, serta tantangan dalam memantau dampak program dalam jangka panjang.¹³

¹² Rahmat, A. (2021). *Gerakan sosial dalam aksi penyelenggaraan sekolah untuk anak miskin*. Masyarakat: Jurnal Sosiologi. Universitas Indonesia. Hlm. 20-24.

¹³ Aulia, S., & Mardiyanto, E. (2024). *Efektivitas pengelolaan dana sosial umat Yayasan Asy-Syafi'iyah dalam pemberdayaan anak yatim di Dusun Rejosari Kelurahan Benowo*. Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah. STAI Al Azhar Menganti Gresik. Hlm. 34-47.

Tabel 1. 1 Penelitian Sejenis Akses Pendidikan Untuk Keluarga Miskin

No	Judul dan Penulis	Konsep/Teori	Temuan Inti	Metodologi	Persamaan dengan penelitian ini	Perbedaan dengan penelitian ini
1.	Judul: Akses Pendidikan Anak Keluarga Miskin (Di Sungai Pisang Kota Padang) Penulis: Recy Harviani Zurwanty, Novalia Indra dan Vivi Puspita Sari Jenis Pustaka: Jurnal (2023) Nama Jurnal: <i>INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research</i> Penerbit: Universitas Putra Indonesia YPTK Padang Sumber: https://j-	Motivasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya akses pendidikan anak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, persepsi orang tua yang masih rendah tentang pendidikan, kurangnya kemauan belajar anak. Rendahnya akses tersebut berakibat kepada menikah muda, pola pikir belum dewasa, menimbulkan kecemburuan sosial, lambatnya kemajuan daerah. Meskipun demikian orang tua, masyarakat sebenarnya sudah punya upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut, diantara upaya itu adalah memberikan perhatian dan nasehat kepada anak, membuat kegiatan sekolah lebih menarik, melengkapi sarana dan prasarana sekolah, memperbaiki akses jalan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekonomi bukanlah hal dominan penyebab rendahnya akses	Kualitatif	(1) Fokus kajian pada program bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin (2) Melihat sejauh mana akses pendidikan meningkat setelah program dilaksanakan (3) Menyoroti pentingnya pendidikan sebagai hak dasar dan ketimpangan sosial sebagai faktor penghambat	(1) Penelitian menyoroti faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya akses pendidikan. Sedangkan peneliti fokus pada upaya bantuan yang diberikan oleh organisasi. (2) Menggunakan konsep motivasi dalam analisis temuan penelitian. Sedangkan peneliti menggunakan Skema “AGIL” (3) Subjek penelitian mencakup lembaga daerah dan lembaga pendidikan, sedangkan peneliti bertumpu pada internal yayasan/organisasi sosial

	innovative.org/index.php/Innovative/article/view/2276		pendidikan anak, namun peran orang tua dan kemauan anak untuk sekolah merupakan hal yang penting saat sekarang.			
2.	Judul: Evaluasi Dampak Program Bantuan Pendidikan di Sekolah Bagi Anak Miskin dan Kurang Mampu di Labuhanbatu Penulis: Dewi Aswita Br Siagian Jenis Pustaka: Jurnal (2024) Nama Jurnal: Jurnal Edukatif Penerbit: Edu Tech Jaya Sumber: https://ejournal.edutec hjaya.com/index.php/edukatif/article/view/	Teori Keadilan Sosial dan Motivasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan memberikan dampak positif di tiga aspek utama. Pertama, akses pendidikan meningkat ditandai dengan kenaikan kehadiran siswa sekitar 15 %. Bantuan yang mengurangi beban biaya terbukti mempermudah anak-anak dari keluarga miskin untuk bersekolah secara teratur. Kedua, kualitas pembelajaran juga membaik. Siswa penerima bantuan menunjukkan prestasi akademik yang lebih tinggi karena dapat belajar dengan fokus dan memiliki sarana belajar yang memadai, sehingga motivasi belajar pun meningkat. Ketiga, bantuan pendidikan meringankan tekanan ekonomi keluarga, memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus berhutang atau mengurangi pengeluaran untuk pendidikan.	<i>Mix method</i>	(1) Fokus kajian pada program bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin (2) Melihat sejauh mana akses pendidikan meningkat setelah program dilaksanakan (3) Menyoroti pentingnya pendidikan sebagai hak dasar dan ketimpangan sosial sebagai faktor penghambat	(1) Mengevaluasi program dengan melihat peningkatan kehadiran, prestasi akademik, dan beban ekonomi keluarga. Sedangkan peneliti fokus pada upaya bantuan yang diberikan oleh organisasi. (2) Mengacu pada teori keadilan sosial dan teori motivasi, sedangkan peneliti menggunakan Skema “AGIL” sebagai pisau analisis (3) Subjek penelitian adalah sekolah, sedangkan peneliti pengurus organisasi (4) Metode yang digunakan mix method, sedangkan peneliti kualitatif

	638					
3.	Judul: Efektivitas Program Bantuan Siswa Miskin Dalam Meningkatkan Prestasi Akademik Siswa (Studi Kasus Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-inayah) Penulis: Okta Rosfiani, Syafira Azani, Abdul Halim, Sandy Chayyan, Firda Amalia Jenis Pustaka: Jurnal (2025) Nama Jurnal: Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang 11 Penerbit: STKIP Subang	Efektivitas Program	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) mampu memberikan dampak positif terutama dalam meringankan beban ekonomi keluarga dan mendorong semangat belajar siswa Sekolah Dasar. Wawancara dengan guru, orang tua, dan siswa serta analisis dokumen nilai akademik memperlihatkan bahwa bantuan biaya sekolah dan kebutuhan belajar membuat siswa lebih termotivasi hadir dan mengikuti pelajaran, sehingga angka putus sekolah menurun. Namun, temuan juga menegaskan bahwa kenaikan prestasi akademik tidak terlalu signifikan. Perbedaan nilai sebelum dan sesudah penerimaan bantuan relatif kecil karena prestasi dipengaruhi faktor lain, seperti kualitas proses pembelajaran di sekolah, dukungan orang tua dalam mendampingi belajar, dan kondisi lingkungan belajar siswa.	Kuantitatif	(1) Fokus kajian nya adalah program bantuan pendidikan pendidikan bagi kelompok rentan (2) Memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program (3) Melihat bahwa bantuan pendidikan sebagai solusi atas permasalahan terbatasnya akses pendidikan	(1) Penelitian mengkaji pengaruh BSM terhadap prestasi akademik, sedangkan peneliti mengkaji akses pendidikan sebagai pemenuhan HAM (2) Penelitian mengacu pada konsep efektivitas program, sedangkan peneliti menggunakan Skema “AGIL” yang digagas oleh Parsons (3) Penelitian mengevaluasi program pemerintah, sedangkan peneliti mengkaji program oleh non pemerintah

	Sumber: https://scholar.google.com/scholar?start=80&q=Akses+Pendidikan+anak+miskin&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1758628237643&u=%23p%3DTvLpBPSYIEcJ					
4.	Judul: Program Kesejahteraan Sosial Melalui Beasiswa Pendidikan Anak Yatim Di Pesantren AL BINAA IBS Bekasi Penulis: Eko Riyanto, Endin Mughadin, Abas Mansur Tamam Jenis Pustaka: Jurnal (2022) Nama Jurnal: Tadarus: Jurnal Pendidikan Islam,	Kesejahteraan Sosial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa program beasiswa pendidikan anak yatim di AL BINAA IBS berjalan efektif melalui integrasi pendidikan formal dari jenjang SD hingga SMA dengan sistem pesantren. Selain pendidikan formal dan keagamaan, AL BINAA IBS juga mengembangkan program pembinaan khusus mencakup aspek ibadah, pengembangan kemandirian, pelatihan komunikasi (muhadharoh), pembinaan oleh para ibu (Daar Al-Ummahat), program pendampingan emosional ("Abang Sayang"), kegiatan kesehatan (Pekan Sehat), hingga kegiatan sosial dan spiritual seperti Saling Berbagi, Tausiyah	Kualitatif deskriptif	(1) Fokus pada pendidikan anak yatim sebagai bentuk pemberdayaan (2) Sama-sama melibatkan lembaga sosial dalam pelaksanaan program (3) Menggunakan pendekatan kualitatif	(1) Penelitian menggunakan pisau analisis kesejahteraan sosial, sedangkan peneliti menggunakan Skema "AGIL" yang digagas oleh Parsons (2) Strategi pemberdayaan anak yatim dan dhuafa dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya pendidikan formal. (3) Lokasi penelitian berbeda

	Universitas Muhammadiyah Surabaya. Sumber: https://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Tadarus/article/view/16215		Subuh, Rihlah, dan Mudik Ramadan. Program beasiswa ini dimulai sejak jenjang SD dengan batas usia maksimal sepuluh tahun atau setara kelas 4 SD, guna menjamin keberlangsungan pembinaan jangka panjang.			
5.	Judul: Pendidikan Formal Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Sialangmunggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru Penulis: Muhammad Naufal Raihan Ali, & Hesti Asriwandari Jenis Pustaka: Jurnal (2024) Nama Jurnal: RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Pendidikan, 2(5), 216–225.	<i>Symbolic Violence</i> oleh Pierre Bourdieu	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi keluarga miskin di Kelurahan Sialangmunggu, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pendidikan formal anak. Keterbatasan ekonomi menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pendidikan, kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan sekolah, serta menimbulkan dampak psikologis pada anak. Dalam banyak kasus, orang tua dihadapkan pada pilihan sulit antara memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan memastikan anak tetap bersekolah. Melalui kerangka teori <i>symbolic violence</i> Pierre Bourdieu, penelitian ini menjelaskan bagaimana struktur sosial turut mempertahankan ketidaksetaraan akses pendidikan. Hambatan ekonomi tidak hanya	Kualitatif	(1) Menitikberatkan pada akses pendidikan formal bagi anak dari kelompok rentan (2) Mengidentifikasi Faktor-faktor yang mempengaruhi akses pendidikan formal kelompok rentan (3) Menekankan bahwa Pendidikan adalah hak dasar setiap anak (4) Menggunakan pendekatan kualitatif	(1) Penelitian fokus pada dampak pendidikan terhadap ekonomi keluarga, sedangkan peneliti fokus pada akses pendidikan keluarga miskin melalui program bantuan pendidikan (2) Penelitian melihat hambatan ekonomi keluarga sebagai penghambat pendidikan, sedangkan peneliti fokus pada dukungan yang diberikan yayasan untuk pendidikan (3) Penelitian menggunakan konsep <i>symbolic violence</i> Pierre Bourdieu, sedangkan peneliti menggunakan Skema “AGIL” yang digagas oleh Parsons

	https://doi.org/10.62383/risoma.v2i5.354 Penerbit: APPISI: Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia Sumber: https://journal.appisi.or.id/index.php/risoma/article/view/354		berdampak pada aspek material, tetapi juga memperkuat kesenjangan sosial yang membatasi kesempatan anak dari keluarga miskin untuk memperoleh pendidikan berkualitas.			sebagai pisau analisis (4)Subjek penelitian nya adalah keluarga miskin, sedangkan peneliti adalah pengelola yayasan
6.	Judul: Akses Pendidikan Dasar Untuk Anak Keluarga Miskin Di Kecamatan Saptosari, Kabupaten Gunungkidul Penulis: Maulida Iffani dan Agus Joko Pitoyo Jenis Pustaka: Skripsi (2021) Penerbit: Universitas Gadjah Mada Sumber: https://etd.repository.	Analysis SWOT (<i>Strength, Weakness, Opportunity, and Treat</i>)	Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) akses pendidikan dasar bagi anak keluarga miskin telah berkembang di Kecamatan Saptosari. Akses ini dipenuhi oleh orangtua maupun pemerintah, faktor seperti faktor ekonomi, geografis, motivasi, lingkungan, dan budaya menjadi dukungan dan hambatan bagi penyelenggaraan pendidikan dasar di Kecamatan Saptosari, (2) Pihak pemerintah telah memberikan dukungan untuk meningkatkan akses pendidikan melalui pemberian fasilitas pendidikan seperti sarana pendidikan dan bantuan dana pendidikan berupa bantuan pembiayaan pendidikan khususnya bagi murid miskin, dan (3) orang tua	Kualitatif	(1)Fokus penelitian pada pemerataan akses pendidikan untuk kelompok rentan (2)Mengkaji peran <i>stakeholder</i> yang terlibat dalam mendukung pemerataan pendidikan kelompok rentan (3)Metode penelitian yang digunakan kualitatif dengan studi kasus.	(1)Fokus pada peran eksternal yakni pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam pelaksanaan program, sedangkan peneliti pada peran internal dari yayasan/organisasi (2)Penelitian fokus pada hambatan dan dukungan pemerintah serta orang tua, sedangkan peneliti pada kontribusi program dalam mendukung akses pendidikan (3)Menggunakan konsep SWOT sebagai pisau analisis, sedangkan peneliti menggunakan Skema “AGIL” yang digagas oleh

	ugm.ac.id/penelitian/detail/108527		keluarga miskin di Kecamatan Saptosari telah memberikan dukungan untuk akses pendidikan dasar anak berupa dukungan ekonomi dan motivasi.			Parsons (4)Lokasi penelitian di Wilayah Kecamatan Saptosari sedangkan peneliti di Kota Bekasi.
7.	Judul: Peran Panti Asuhan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Melalui Program Akses Pendidikan (Studi Pada 5 Anak Keluarga Miskin Di Panti Asuhan Putra Nusa-putra, Pejompongan, Jakarta Pusat) Penulis: Nurul Widyaningsih Jenis Pustaka: Thesis (2020) Penerbit: Universitas Negeri Jakarta Sumber:	Kesejahteraan Sosial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Panti Asuhan Putra Nusa-Putra berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak keluarga miskin melalui program akses pendidikan. Panti tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat menampung anak yatim piatu, tetapi telah bergeser menjadi lembaga penyedia layanan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Pelaksanaan program ini berjalan baik berkat dukungan masyarakat yang terus memberikan sumbangan, sehingga kebutuhan biaya pendidikan anak asuh dapat terpenuhi. Namun, panti menghadapi kendala berupa ketidakseimbangan jumlah penerima, di mana anak yatim piatu yang ditampung lebih sedikit dibandingkan anak dari keluarga	Kualitatif	(1)Menitikberatkan pada akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin (2)Menganalisis peran lembaga sosial dalam memberi layanan pendidikan bagi kelompok miskin (3)Menyoroti pentingnya pendidikan sebagai hak dasar setiap anak (4)Menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus	(1)Penelitian menggunakan teori kesejahteraan sosial sebagai pisau analisis, sedangkan peneliti menggunakan Skema “AGIL” yang digagas oleh Parsons (2)Perbedaan lokasi penelitian

	http://repository.unj.ac.id/11176/		miskin, sehingga fungsi awal panti asuhan sedikit bergeser.			
8.	Judul: Peran Dompot Dhuafa Waspada Dalam Memberikan Program Pendidikan Kepada Anak-Anak Kurang Mampu di Kota Medan Penulis: Zuhri M Nawawi, Feby Maulydia Nasution Jenis Pustaka: Jurnal (2022) Nama Jurnal: El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat Penerbit: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Sumber: https://scholar.google.	Pemanfaatan ZISWAF	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dompot Dhuafa Waspada berperan signifikan dalam membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin di Kota Medan. Melalui studi literatur ditemukan bahwa lembaga ini mengelola berbagai program pendidikan gratis dan beasiswa, seperti Sekolah Bintang Rabbani, Beasiswa Sukses, dan SMART Ekselensia, yang dibiayai dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Sekolah Bintang Rabbani, misalnya, menyediakan jenjang pendidikan dari madrasah ibtidaiyah hingga SMA secara cuma-cuma, lengkap dengan sarana seperti laboratorium komputer, perpustakaan, dan asrama, sehingga anak yatim dan dhuafa di wilayah minoritas Muslim dapat bersekolah tanpa hambatan biaya. Selain pendidikan formal, program beasiswa dan pelatihan kewirausahaan seperti Beasiswa Sukses dirancang untuk mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu agar memiliki keterampilan bisnis dan kemandirian ekonomi.	Kualitatif	(1) Mengkaji program bantuan pendidikan untuk mengurangi hambatan biaya sekolah dan mendorong kelanjutan belajar bagi anak-anak dari keluarga miskin. (2) Menganalisis keterlibatan lembaga non-pemerintah (Dompot Dhuafa Waspada maupun Graha Yatim dan Dhuafa) dalam memberikan solusi pendidikan alternatif. (3) Keduanya menggunakan penelitian kualitatif	(1) Penelitian menggunakan konsep pemanfaatan ziswaf sebagai pisau analisis, sedangkan peneliti menggunakan Skema “AGIL” yang digagas oleh Parsons (2) Penelitian Dompot Dhuafa Waspada berbasis studi literatur, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus lapangan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. (3) Lokasi penelitian berbeda

	com/scholar?start=30 &q=Akses+Pendidikan+formal+anak+miskin&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&t=1758683945199&u=%23p%3DogyhxBqtA0J					
9.	Judul: Gerakan Sosial dalam Aksi Penyelenggaraan Sekolah untuk Anak Miskin Penulis: Abdi Rahmat Jenis Pustaka: Jurnal (2021) Nama Jurnal: Masyarakat, Jurnal Sosiologi. Penerbit: Universitas Indonesia Sumber: https://scholarhub.ui.ac.id/mjs/vol19/iss1/2/	Gerakan Sosial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Civil Society Organization (CSO) berperan penting dalam penyelenggaraan sekolah bagi anak-anak miskin di wilayah yang tidak terjangkau layanan negara. Aksi pendidikan yang mereka lakukan berangkat dari keprihatinan terhadap kemiskinan struktural dan kekecewaan terhadap negara yang belum mampu memenuhinya. CSO dalam penelitian ini berfungsi sebagai aktor gerakan sosial dengan model community-based organization (CBO), yang dikelola sederhana namun tetap berkelanjutan berkat nilai voluntarisme religius serta jaringan sosial lokal hingga nasional. Sekolah-sekolah yang diselenggarakan CSO tidak hanya memberikan akses pendidikan, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan dan pembekalan modal kultural maupun simbolik bagi anak miskin	Kualitatif	(1)Mengkaji upaya lembaga non pemerintah (CSO) dalam upaya mendukung pendidikan anak-anak miskin (2)Kelompok sasaran program yaitu anak-anak miskin yang tidak memiliki akses pendidikan (3)Menekankan pentingnya bahwa pendidikan adalah hak dasar setiap anak (4)Menggunakan pendekatan kualitatif dengan observasi, wawancara, dan analisis dokumen	(1)Penelitian fokus pada peran gerakan sosial, sedangkan peneliti fokus pada akses pendidikan keluarga miskin melalui program bantuan pendidikan (2)Penelitian mengkaji dengan konsep gerakan sosial dan CSO, sementara peneliti menggunakan konsep “AGIL” oleh Parsons sebagai pisau analisis (3)Penelitian mencakup lembaga pendidikan formal dan nonformal, sementara peneliti hanya fokus pada bantuan program pendidikan formal (4)Penelitian dilakukan di 4 lembaga pendidikan di wilayah Jakarta, sedangkan peneliti fokus pada 1

			agar kelak mampu melakukan perubahan struktural.			yayasan anak yatim dan dhuafa
10.	Judul: Efektivitas Pengelolaan Dana Sosial Umat Yayasan Asy-syafi'iyah Dalam Pemberdayaan Anak Yatim Di Dusun Rejosari Kelurahan Benowo Penulis: Syafira Aulia, Eko Mardyanto Jenis Pustaka: Jurnal (2024) Nama Jurnal: Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah Sumber: https://ejournal.unwah.ac.id/index.php/izdihar/article/view/3912	Pemberdayaan Sosial	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yayasan Asy-Syafi'iyah mampu mengelola dana sosial umat secara cukup efektif melalui pendekatan yang terstruktur dan terencana. Dana yang dihimpun tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak yatim, tetapi juga diarahkan pada program-program pemberdayaan seperti dukungan pendidikan, layanan kesehatan, serta pelatihan keterampilan. Dari sisi pendidikan, anak-anak yatim mendapatkan akses yang lebih baik terhadap sekolah dan kebutuhan belajar. Dalam aspek kesehatan, mereka juga memperoleh perhatian yang membantu meningkatkan kondisi fisik dan kesejahteraan secara umum. Selain itu, program pengembangan keterampilan turut berperan dalam membangun kemandirian anak-anak, sehingga mereka memiliki bekal untuk masa depan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan dana, perlunya koordinasi yang lebih optimal dengan berbagai pihak, serta tantangan	Kualitatif	(1) Kedua penelitian sama-sama membahas peran yayasan/organisasi sosial dalam membantu anak yatim dan kelompok rentan. (2)Menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat sekitar dalam mendukung terwujudnya tujuan program (3)Menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.	(1)Penelitian berfokus pada efektivitas pengelolaan dana sosial umat untuk pemberdayaan, sedangkan peneliti fokus pada upaya peningkatan akses pendidikan (2)Penelitian menitikberatkan pada manajemen dana dan dampak pemberdayaan, sedangkan peneliti menekankan pada peran program pendidikan serta mekanisme penyaluran beasiswa. (3)Lokasi dan objek penelitian berbeda, penelitian pertama dilakukan di Yayasan Asy-Syafi'iyah di Dusun Rejosari, sedangkan penelitian ini di Yayasan Harapan Robbani (GRAY).

			dalam memantau dampak program dalam jangka panjang.			
11.	Judul: <i>Effectiveness of government policy interventions towards enhancing access to pre-primary and primary education by street children in North Rift Kenya</i> Penulis: Paul Lagat, dkk. Jenis Pustaka: Jurnal (2024) Nama Jurnal: <i>WJARR: World Journal of Advanced Research and Reviews</i> Penerbit: <i>Department of Education Management and Policy Study - Moi University</i> Sumber: https://www.semantic	Kebijakan Pendidikan Inklusi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa intervensi kebijakan pemerintah di Kenya berpengaruh signifikan terhadap akses pendidikan anak jalanan di jenjang prasekolah dan sekolah dasar. Analisis statistik mengungkapkan hubungan yang kuat antara kebijakan nasional pendidikan pra-sekolah dengan akses pendidikan anak jalanan ($r = 0,711$), serta hubungan sempurna antara kebijakan pendidikan inklusif dengan peningkatan akses pendidikan ($r = 1,0$). Meskipun pemerintah telah menyediakan pendanaan dan kebijakan untuk memperluas kesempatan pendidikan, masih banyak anak jalanan yang belum bersekolah. Penelitian ini menegaskan perlunya memperkuat kolaborasi dengan pihak lain seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi berbasis komunitas, sekolah, dan dinas terkait agar upaya peningkatan akses pendidikan bagi anak jalanan lebih efektif dan berkelanjutan.	<i>Mixed method</i> (kuantitatif + kualitatif), dengan analisis statistik & tematik.	(1) Fokus penelitiannya mengenai akses pendidikan bagi anak-anak dari kelompok marginal (2) Mengidentifikasi peran stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan pendidikan (3) Menekankan pentingnya dukungan eksternal untuk tercapainya pemerataan akses pendidikan untuk anak	(1) Penelitian fokus pada efektivitas kebijakan pemerintah bagi anak jalanan, sedangkan penelitian fokus pada upaya yayasan dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak kelompok miskin (2) Stakeholder yang terlibat didominasi oleh pemerintah, sedangkan peneliti bersumber dari organisasi non-pemerintah (3) Menggunakan konsep Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk analisis, sementara peneliti menggunakan konsep "AGIL" oleh Parsons sebagai pisau analisis (4) Perbedaan metode dan lokasi penelitian

	scholar.org/paper/Effectiveness-of-government-policy-interventions-to-Lagat-Joseph/7aa10b09cafa84268d4f1bdbc773c109bf636879					
12.	Judul: <i>Sustainable development goal 4: An education goal to achieve equitable quality education</i> Penulis: Surattana Adipat dan Rattanawadee Chotikapanich Jenis Pustaka: Jurnal (2022) Nama Jurnal: <i>Academic Journal of Interdisciplinary Studies</i> Penerbit: Richtmann Publishing Sumber:	Sustainable development goal 4	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Berkualitas (SDG 4) memiliki peran sentral dalam pencapaian Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, karena pendidikan bukan hanya instrumen peningkatan kapasitas individu tetapi juga pondasi terciptanya masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Data menunjukkan bahwa pada 2018 sekitar 20% anak di dunia tidak bersekolah, dan lebih dari separuh yang bersekolah masih memiliki keterampilan literasi dan numerasi yang rendah. Berbagai inisiatif global seperti Higher Education Sustainability Initiative dan UNICEF Global Action Plan berupaya memperkuat strategi pendidikan yang berorientasi pada keberlanjutan. Negara-negara seperti India melalui program Education for All dan Thailand dengan penguatan	Kualitatif	(1)Fokus pembahasan nya yaitu pemerataan akses pendidikan bagi kelompok rentan (2)Menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar manusia (3)Kelompok sasaran nya yaitu anak-anak usia sekolah dari kelompok rentan (4)Melibatkan banyak pihak terkait guna mencapai tujuan program (5)Menggunakan pendekatan kualitatif	(1)Penelitian mengkaji hubungan pendidikan dengan pembangunan berkelanjutan global, sedangkan peneliti fokus pada akses pendidikan keluarga miskin melalui program bantuan pendidikan (2)Penelitian menggunakan konsep SDGs 4 (pendidikan inklusif, setara, berkualitas, <i>lifelong learning</i>), sementara peneliti menggunakan konsep “AGIL” oleh Parsons sebagai pisau analisis (3)Pengumpulan data dilakukan dalam level global (beberapa negara) sedangkan peneliti mengkaji level lokal

	https://scholar.google.com/scholar?start=10&q=Educational+access+for+marginalized+children&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2021#d=gs_qabs&t=1756267533370&u=%23p%3DqJZBE8vdcooJ		sistem pendidikan tinggi telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam mendukung implementasi SDG 4, khususnya dalam hal pemerataan akses, pelatihan guru, dan peningkatan kualitas pembelajaran. Namun, pandemi COVID-19 berdampak besar terhadap sistem pendidikan global, menghambat progres pencapaian target, dan memunculkan prediksi bahwa lebih dari 200 juta siswa berpotensi putus sekolah.			(4)Data dikumpulkan melalui data sekunder dari berbagai negara, sementara peneliti menggunakan data primer melalui observasi dan wawancara
13.	Judul: <i>Sustainable Development Goal for Quality Education (SDG 4): A Study of Progress Worldwide</i> Penulis: Muhammad Ajmal, Muhammad Arif, dan Muhammad Irfan Jenis Pustaka: Jurnal (2022) Nama Jurnal: <i>Frontiers in Education</i> Penerbit: Frontiers	Sustainable Development Goal 4	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDG 4 mempunyai peran penting dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan berkualitas untuk semua orang. Namun, kemajuannya masih terhambat karena sekitar 272 juta anak dan remaja belum masuk ke dalam sistem pendidikan (meningkat 3% pada tahun 2023). Beberapa faktor utama yang menjadi penghalang adalah kemiskinan, ketimpangan gender, disabilitas, serta konflik, terutama di negara berkembang. Kelompok-kelompok ini sering kesulitan mendapatkan akses pendidikan. India dengan program pendidikan inklusif, serta Thailand melalui reformasi guru, menunjukkan adanya kemajuan yang	Kualitatif	(1)Fokus pembahasan nya yaitu akses pendidikan kelompok rentan (2)Menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar untuk pembangunan berkelanjutan (3)Kelompok sasaran nya yaitu anak usia sekolah dari keluarga miskin (4)Menggunakan pendekatan kualitatif	(1)Penelitian mengkaji implementasi SDG 4 level global, sedangkan peneliti fokus pada akses pendidikan melalui organisasi lokal (2)Penelitian menggunakan konsep SDG 4 (inklusif, setara, berkualitas), sementara peneliti menggunakan konsep “AGIL” oleh Parsons sebagai pisau analisis. (3)Data dikumpulkan melalui literatur sekunder, sementara peneliti menggunakan data primer wawancara informan.

	Media SA Sumber: https://www.researchgate.net/publication/384107109_Sustainable_Development_Goal_for_Quality_Education_SDG_4_A_study_on_SDG_4_to_extract_the_pattern_of_association_among_the_indicators_of_SDG_4_employing_a_genetic_algorithm		cukup signifikan dalam pemerataan akses dan peningkatan kualitas belajar. Namun, pandemi COVID-19 sempat menghambat kemajuan tersebut, dengan perkiraan sekitar 200 juta siswa beresiko putus sekolah.			
14.	Judul: <i>Vulnerable children's right to education, school exclusion, and pandemic law-making</i> Penulis: Lucinda Ferguson Jenis Pustaka: Jurnal (2021) Nama Jurnal: <i>International Journal of Inclusive Education</i>	Pendidikan Inklusi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum pendidikan di Inggris belum mampu melindungi hak pendidikan anak-anak kelompok rentan selama pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari meningkatnya kasus pengeluaran siswa dari sekolah (<i>school exclusion</i>) secara drastis, serta adanya aturan darurat yang justru memperburuk akses pendidikan bagi kelompok rentan. Anak-anak dari keluarga miskin, kelompok etnis minoritas, dan penyandang disabilitas lebih sering terdampak. Mereka mengalami praktik " <i>off-rolling</i> " (pengeluaran siswa secara tidak resmi atau ilegal)	Kualitatif	(1) Kedua penelitian sama-sama membahas akses dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak dari kelompok rentan. (2) Sama-sama menekankan pentingnya intervensi atau dukungan tambahan agar anak-anak tetap dapat mengakses pendidikan secara layak. (3) Sama-sama menitikberatkan pada faktor eksternal seperti kebijakan dan kondisi sosial ekonomi sebagai hambatan akses	(1) Penelitian menitikberatkan pada kegagalan kebijakan hukum pendidikan dalam melindungi hak anak selama pandemi, sedangkan peneliti fokus pada upaya yayasan dalam meningkatkan akses pendidikan. (2) Stakeholder nya didominasi oleh pemerintah dan lembaga pendidikan, sedangkan peneliti melibatkan pengurus yayasan dari organisasi non-pemerintah

	Penerbit: Taylor & Francis Sumber: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13632752.2021.1913351		hingga 36% lebih tinggi. Selain itu, kebijakan belajar dari rumah (<i>homeschooling</i>) saat darurat juga membuat sekitar 70% anak dari keluarga miskin tidak bisa mengikuti pembelajaran karena keterbatasan akses teknologi.		pendidikan anak kelompok rentan.	(3)Penelitian menggunakan pendekatan hukum dan hak anak, sementara peneliti menggunakan konsep AGIL oleh Parsons sebagai pisau analisis.
15.	Judul: <i>Education Opportunities and Support for Orphans and Vulnerable Children in Bagamoyo District Tanzania</i> Penulis: Bertha Erasto Losioki Jenis Pustaka: Jurnal (2021) Nama Jurnal: <i>East African Journal of Education Studies</i> Penerbit: Mwalimu Nyerere Memorial Academy Sumber: https://journals.eanso	The Bio Ecological Theory of Human Development	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi semua anak, terutama anak yatim dan anak rentan (OVC) di Tanzania. Pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk masa depan mereka. Penelitian yang dilakukan di Distrik Bagamoyo ini melibatkan 102 anak usia 7–15 tahun serta 35 informan dewasa. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak OVC sudah mendapatkan akses pendidikan dasar secara gratis. Namun, mereka masih mengalami kesulitan untuk melanjutkan ke pendidikan menengah. Keterbatasan ini terutama disebabkan oleh masalah ekonomi, seperti kurangnya sumber dana yang stabil untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari dan perlengkapan sekolah. Selain itu,	Kualitatif	1)Fokus pembahasan nya yaitu pemerataan akses pendidikan bagi kelompok rentan (2)Menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar manusia (3)Kelompok sasaran nya yaitu anak-anak usia sekolah dari kelompok rentan	(1)Penelitian fokus pada identifikasi hambatan akses pendidikan serta pengaruh psikologis anak, sedangkan peneliti fokus pada upaya yayasan melalui program beasiswa dalam meningkatkan akses pendidikan bagi anak yatim dan dhuafa. (2)Subjek penelitian melibatkan anak-anak kelompok rentan dan masyarakat umum, sedangkan peneliti hanya melibatkan internal organisasi (3)Penelitian dilakukan di di Distrik Bagamoyo, Tanzania dengan pendekatan kualitatif eksploratif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan kualitatif

	org/index.php/eajes/article/view/250		anak-anak yang tinggal bersama keluarga besar cenderung menghadapi tantangan yang lebih berat dibandingkan mereka yang tinggal di panti asuhan. Dari sisi psikologis, baik anak yang tinggal di keluarga maupun di panti asuhan sama-sama menghadapi berbagai masalah, seperti rasa kesepian, stres, dan depresi. Kondisi ini juga turut mempengaruhi proses belajar mereka.			dengan studi kasus di Wilayah Bekasi dan Jakarta
--	--	--	--	--	--	--

1.6 Kerangka Konseptual

1.6.1 Akses Pendidikan

Akses pendidikan adalah kemampuan dan kesempatan bagi setiap individu untuk mendapat layanan pendidikan yang layak dan sesuai kebutuhan, tanpa hambatan yang bersifat ekonomi, geografis, budaya, atau sosial. Akses tidak hanya berarti masuk sekolah (*enrolment*), tetapi mencakup proses yang lebih menyeluruh seperti kelangsungan pendidikan (*retention*), kehadiran yang reguler (*attendance*), kemampuan memperoleh manfaat dari pendidikan yang diberikan (termasuk kualitas belajar), serta keamanan dan kenyamanan lingkungan belajar.¹⁴ Di Indonesia, penelitian serupa oleh Novrian Satria dengan judul "Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan untuk Anak-Anak di Indonesia" menunjukkan bahwa akses pendidikan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti latar belakang sosial ekonomi, jarak ke sekolah, pendidikan orang tua, pendapatan rumah tangga, jumlah anggota keluarga, dan jenis kelamin anak.¹⁵

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat didefinisikan sebagai hak-hak dasar yang secara inheren melekat pada setiap individu, semata-mata karena ia adalah manusia. Hak ini melekat sejak lahir, bukan hasil pemberian masyarakat, negara, atau pihak mana pun, melainkan merupakan hak bawaan yang sudah menjadi bagian dari keberadaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Tanpa hak-hak ini, manusia tidak dapat hidup secara bermartabat sebagai manusia seutuhnya. Salah satu definisi yang paling lengkap mengenai konsep ini datang dari Abul A'la al-Mawdudi, yang menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak pokok yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia, tanpa memandang perbedaan warga negara, agama, atau latar belakang lainnya.

¹⁴ Lewin, Keith M. (2015). *Educational Access, Equity, and Development: Planning to Make Rights Realities*. Paris: UNESCO-IIEP. Diakses dari <https://unesdoc.unesco.org> 23 September 2025.

¹⁵ Perdana, Novrian Satria. (2015). *Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Aksesibilitas Memperoleh Pendidikan untuk Anak-Anak di Indonesia*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Hlm. 285-288.

Konsep Hak Asasi Manusia lahir dan berkembang melalui proses perjuangan yang panjang. Meskipun konsep modern tentang HAM berakar kuat pada abad ke-17 dan ke-18, jejak awal gagasan tentang kebebasan dan keadilan individu dapat ditelusuri hingga peradaban kuno, seperti di Yunani, di mana para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles mulai merenungkan ide-ide tentang keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan. Era Pencerahan pada abad ke-17 dan ke-18 menjadi titik balik krusial dalam sejarah HAM. Para pemikir seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Voltaire mengembangkan gagasan tentang hak-hak alamiah yang melekat pada individu, termasuk hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan (properti).¹⁶

Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis mengadopsi prinsip-prinsip HAM ke dalam deklarasi-deklarasi yang secara eksplisit menyatakan bahwa "semua orang diciptakan setara" dan memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut. Deklarasi Kemerdekaan AS (1776) dan Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara Perancis (1789) menegaskan bahwa hak-hak dasar individu harus dihormati oleh negara dan pemerintahan. Prinsip tersebut mencakup *Freedom of expression* (kebebasan mengeluarkan pendapat), *freedom of religion* (bebas menganut keyakinan/agama yang dikehendaki), *the right of property* (perlindungan hak milik), serta hak-hak dasar lainnya. Setelah Perang Dunia II dan banyaknya pelanggaran HAM berat yang terjadi, kondisi masyarakat yang tidak stabil menciptakan konsensus global yang mendesak akan perlunya sebuah standar etika dan hukum internasional yang mengikat secara moral.

Sebagai respons terhadap kegagalan perlindungan manusia, Perserikatan Bangsa-bangsa resmi berdiri pada tahun 1948. Pada 10 Desember 1948, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* melalui *General Assembly Resolution 217 A (III)*. Deklarasi ini merupakan standar umum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia secara internasional haruslah dilindungi dan menjadi dokumen pertama yang secara global mengakui dan mengatur hak-hak dasar manusia. Deklarasi

¹⁶ Imran, Zulfi. (2019). *Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional Dalam Perspektif Islam*. Jurnal Hukum Responsif FH Unpab. Universitas Pembangunan Panca Budi. Hlm. 32-33

Universal Hak Asasi Manusia secara tegas mengabadikan hak atas pendidikan dalam Pasal 26. Pasal ini menyatakan bahwa "Setiap orang berhak mendapat pendidikan". UDHR menegaskan bahwa pendidikan bukan hanya kebutuhan individu tetapi juga sarana untuk menghormati hak asasi manusia secara luas.¹⁷

Pendidikan tidak berdiri sebagai hak yang terpisah, melainkan merupakan hak dasar yang menjadi landasan bagi pemenuhan berbagai hak asasi manusia lainnya. Gagasan ini berlandaskan pada pemahaman bahwa tanpa pendidikan, seseorang tidak memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan sarana yang cukup untuk mengenali hak-haknya, memperjuangkannya, serta terlibat secara penuh dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian oleh Rohmatul Hasanah sejalan dengan argumen di atas, dengan menunjukkan bahwa pendidikan adalah "elemen krusial" dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, mengurangi ketidaksetaraan sosial, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Ketimpangan akses pendidikan di daerah terpencil di Indonesia secara eksplisit menyebutkan bahwa masalah ini mencerminkan pengabaian terhadap prinsip non-diskriminasi dalam HAM. Ketidaksetaraan akses pendidikan, yang disebabkan oleh minimnya infrastruktur, keterbatasan anggaran, dan kurangnya tenaga pendidik berkualitas, bukan hanya masalah logistik, melainkan juga pelanggaran terhadap HAM yang telah dijamin secara universal dan nasional.

Komitmen Indonesia terhadap pemenuhan hak atas pendidikan tercermin dalam konstitusi dan undang-undang nasional. Hak ini secara eksplisit dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945, yang menyatakan bahwa "setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan" dan "setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Amanat konstitusi ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya hak individu, tetapi juga kewajiban negara untuk menyelenggarakannya dan membiayainya. Lebih rinci, hak atas pendidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pasal 4 Ayat 1 UU ini secara tegas menyatakan bahwa pendidikan harus diselenggarakan "secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif

¹⁷ United Nations. (1948). *Universal declaration of human rights*. United Nations.

dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Prinsip non-diskriminasi ini memastikan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk warga negara dengan kelainan fisik, emosional, atau sosial. UU ini juga menjamin hak atas pendidikan bagi warga negara di daerah terpencil atau terbelakang.¹⁸

1.6.2 Kelompok Rentan (*Vulnerable Group*)

Kerentanan (*vulnerability*) adalah kondisi suseptibilitas yang meningkat terhadap bahaya atau dampak negatif dari suatu peristiwa. Kelompok rentan dipahami sebagai penduduk yang memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami penderitaan atau kerugian dan sering kali dikucilkan dari layanan keuangan serta sosial dasar.¹⁹ Pada dasarnya, kerentanan (*vulnerability*) berkaitan dengan kondisi ketika seseorang atau kelompok lebih mudah terdampak oleh berbagai risiko atau kesulitan. Kerentanan dapat dipahami sebagai ketidakmampuan untuk mengambil tindakan yang efektif dalam mencegah atau mengurangi kerugian. Kerentanan muncul ketika seseorang tidak memiliki kemampuan atau kesempatan untuk melakukan tindakan mitigasi terhadap bahaya yang dihadapi. Kerentanan dapat dilihat dari dua perspektif ruang, yaitu kerentanan dalam ruang geografis yang menunjukkan lokasi atau wilayah yang rentan, serta kerentanan dalam ruang sosial yang menunjukkan kelompok masyarakat mana yang paling rentan di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan individu atau kelompok dalam menghadapi bahaya dapat berbeda-beda, tergantung pada posisi mereka dalam lingkungan fisik maupun sosial.

Secara teoritis, kerentanan dapat dipahami melalui interaksi tiga variabel utama: paparan (*exposure*), sensitivitas (*sensitivity*), dan kapasitas adaptasi (*adaptive capacity*). Paparan menunjukkan seberapa besar dan seberapa lama individu atau kelompok masyarakat berada dalam kondisi yang berisiko. Sementara

¹⁸ Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

¹⁹ WHO. (2022). *Vulnerability and Vulnerable Populations*. Diakses dari <https://wkc.who.int/our-work/health-emergencies/knowledge-hub/community-disaster-risk-management/vulnerability-and-vulnerable-populations> pada 15 Oktober 2025.

itu, sensitivitas menunjukkan sejauh mana individu atau kelompok dapat menerima guncangan tanpa mengalami kerusakan jangka panjang. Hal ini berkaitan dengan kemampuan adaptasi individu atau kelompok untuk menghadapi tekanan dan perubahan yang disebabkan oleh faktor sosial, politik, maupun lingkungan. Seseorang dapat dianggap rentan jika mereka terpapar pada risiko tinggi (misalnya tinggal di daerah rawan bencana atau bekerja di sektor informal), memiliki sensitivitas tinggi terhadap dampak (misalnya kondisi fisik yang lemah), dan memiliki kapasitas adaptasi yang rendah (misalnya ketiadaan asuransi atau tabungan).²⁰

Istilah “kelompok rentan” (*vulnerable group*) sering mendapat kritik karena dianggap menggambarkan kelompok tertentu sebagai pihak yang pasif, lemah, dan membutuhkan perlindungan. Cara penyebutan ini juga bisa memberi label stigma, seolah-olah kerentanan adalah sifat bawaan dari individu atau kelompok tersebut. Sebagai alternatif, muncul konsep “terentankan” (*vulnerabilidade*). Kata terentankan menunjukkan bahwa kerentanan bukanlah sesuatu yang melekat secara alami pada individu, tetapi merupakan hasil dari proses sosial yang berlangsung terus-menerus. Kerentanan dapat muncul karena berbagai faktor. Kerentanan dapat berupa kondisi fisik maupun keadaan atau situasi yang terkait dengan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sebagai contoh, bayi dan anak kecil pada umumnya lebih berisiko terpapar virus dan penyakit ketimbang orang dewasa. Sama halnya dengan penyandang disabilitas maupun masyarakat adat, mengalami lebih sedikit manfaat sosial ekonomi ketimbang yang lain, termasuk minimnya akses layanan kesehatan dan pendidikan, hingga risiko tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Selain itu, faktor sosial seperti diskriminasi dapat membuat kelompok tertentu lebih sering menghadapi prasangka, ketidakadilan, atau perlakuan yang tidak setara.²¹

Kerentanan juga dapat disebabkan faktor kekuasaan atau pengaruh satu kelompok terhadap dominasi kelompok yang lain, misalnya keberadaan kelompok

²⁰ DEFEN-CE: *Understanding Vulnerability: A Theoretical and Conceptual Framework*. Diakses dari <https://ideas.repec.org> pada 15 Oktober 2025.

²¹ Sustainability Directory. (2025). *Vulnerability and Marginalization*. Diakses dari <https://lifestyle.sustainability-directory.com/term/vulnerability-and-marginalization/#fundamentals> pada 15 Oktober 2025.

minoritas terhadap mayoritas dalam wilayah tertentu. Kerentanan erat kaitanya dengan masalah keberdayaan atau ketidakberdayaan. Judith Butler melalui konsep *precarity* menjelaskan bahwa beberapa kelompok masyarakat dibuat menjadi lebih tidak aman atau rapuh oleh pengaturan sosial dan politik tertentu. Kondisi ini membuat mereka lebih rentan terhadap kekerasan, kehilangan hak, atau ketidakpastian hidup. Kerentanan seperti ini bukan terjadi secara kebetulan, tetapi hasil dari kebijakan, ketimpangan kekuasaan, atau kelalaian dalam sistem sosial.²² Kombinasi kerentanan mengakibatkan kelompok-kelompok tersebut lebih berisiko menghadapi hambatan dalam mengakses pelayanan dasar hingga perlindungan sosial, terutama ketika informasi tidak tersedia secara memadai, tidak dapat diakses atau bahkan tidak dibagikan secara khusus untuk mereka.²³

Kementerian Sosial RI mendefinisikan kelompok rentan sebagai masyarakat yang memiliki karakteristik/kondisi dengan resiko tinggi mengalami hambatan dalam mengakses pelayanan publik, baik secara fisik, sosial, ekonomi, lingkungan dan/atau geografis. Termasuk Penyandang Disabilitas, Lansia, Ibu Hamil/Menyusui, Anak-anak dan Korban Bencana Alam/Sosial. Kementerian Sosial Republik Indonesia menggunakan istilah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok yang memerlukan intervensi sosial. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Individu, Keluarga Kelompok dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat menjalankan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar. Pemerintah melalui Kementerian Sosial telah menetapkan jenis PMKS sebagai berikut :

1. Anak Balita Terlantar: Anak usia <5 tahun yang ditelantarkan atau berada dalam keluarga sangat miskin.

²² Prakash, A. (2021). *Introduction: Pandemic precarity. Journal of Social and Economic Development*. Hlm 229-233.

²³ INFID (International NGO Forum on Indonesian Development). (2019). *Kelompok Warga Rentan Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. Diakses dari <https://infid.org> pada 15 Oktober 2025.

2. Anak Terlantar: Anak usia 6-18 tahun yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi secara layak.
3. Anak Berhadapan dengan Hukum: Anak yang menjadi tersangka, terdakwa, atau korban tindak pidana.
4. Anak Jalanan: Anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bekerja di jalanan (pengamen).
5. Anak dengan disabilitas: Anak di bawah 18 tahun dengan hambatan fisik atau mental.
6. Anak Korban Kekerasan: Anak yang mengalami perlakuan kasar fisik/psikis di lingkungannya.
7. Anak dalam situasi darurat, konflik, atau korban eksploitasi.
8. Lanjut Usia Terlantar: Lansia tanpa pengasuhan keluarga dan tidak memiliki sumber ekonomi.
9. Penyandang Disabilitas: Orang dengan keterbatasan fungsi fisik, mental, atau sensorik jangka panjang.
10. Tuna Susila: Individu yang terlibat dalam prostitusi akibat faktor sosial ekonomi.
11. Gelandangan: Orang yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan hidup di jalanan.
12. Pengemis: Orang yang mencari penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum.
13. Pemulung: Individu yang mencari penghasilan dengan mengumpulkan barang bekas.
14. Kelompok Minoritas: Kelompok yang terpinggirkan karena ras, suku, agama, atau orientasi seksual.
15. Bekas Warga Binaan Lapas: Mantan narapidana yang kesulitan berinteraksi kembali secara sosial.
16. Orang dengan HIV/AIDS: Individu yang terinfeksi HIV dan mengalami stigma serta diskriminasi.
17. Korban Penyalahgunaan NAPZA: Orang yang mengalami ketergantungan obat-obatan terlarang.

18. Korban *Trafficking*: Orang yang menjadi korban perdagangan manusia untuk eksploitasi.
19. Korban Tindak Kekerasan: Orang yang mengalami kekerasan fisik, psikis, atau seksual.
20. Pekerja Migran Bermasalah: PMI yang mengalami masalah hukum atau sosial di negara penempatan.
21. Korban Bencana Alam: Orang yang kehilangan aset dan mata pencaharian akibat peristiwa alam.
22. Korban Bencana Sosial: Orang yang terdampak konflik sosial, kerusuhan, atau aksi teror.
23. Perempuan Rawan Sosio-Ekonomi: Janda atau perempuan kepala keluarga miskin yang rentan.
24. Fakir Miskin: Orang yang tidak memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar.
25. Keluarga Bermasalah Psikologis: Keluarga yang mengalami krisis mental yang berat.
26. Komunitas Adat Terpencil (KAT): Masyarakat adat yang tinggal di wilayah geografis sulit dijangkau.²⁴

1.6.3 Anak dari Kelompok Miskin

Secara etimologi, kata "kemiskinan" berasal dari kata dasar "miskin." Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "miskin" memiliki arti "tidak berharta," atau "serba kekurangan (berpenghasilan sangat rendah)". Kemiskinan adalah suatu "hal miskin" atau "keadaan miskin" di mana individu atau sekelompok orang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk mempertahankan tingkat kehidupan minimum. Secara terminologi, kemiskinan secara umum didefinisikan sebagai kondisi serba kekurangan yang dialami seseorang, yang membuatnya tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya seperti sandang, pangan, papan,

²⁴ Kementerian Sosial RI. (2019). *Permensos Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial*.

pendidikan, dan kesehatan.²⁵ Menurut Soerjono Soekanto, kemiskinan adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompoknya. Kondisi ini mencakup ketidakmampuan untuk memanfaatkan potensi mental maupun fisik dalam kehidupan bermasyarakat. Definisi ini menekankan bahwa kemiskinan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan keterbatasan dalam berpartisipasi sosial.²⁶

Anak dari keluarga miskin adalah individu berusia di bawah 18 tahun yang hidup dalam rumah tangga dengan keterbatasan ekonomi sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, maupun pendidikan. Kemiskinan keluarga berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak, dengan demikian anak dari keluarga miskin bukan hanya mengalami kekurangan materi, tetapi juga keterbatasan akses terhadap peluang pengembangan diri dan partisipasi sosial yang setara dengan anak-anak lain. Dalam pandangan Amartya Sen, seorang Ekonom penerima Nobel, beliau menyatakan bahwa kemiskinan adalah "kegagalan untuk memiliki kapabilitas minimum tertentu". Definisi ini sejalan dengan konsep ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal agar dapat hidup layak.²⁷ Kemiskinan bukan hanya kekurangan materi, tetapi juga keterbatasan kesempatan untuk hidup bermartabat, sehat, berpendidikan, serta berpartisipasi dalam masyarakat.

Kemiskinan bukanlah kondisi yang homogen, melainkan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan faktor penyebabnya;

1. Kemiskinan Absolut: Jenis kemiskinan ini didasarkan pada ketidakmampuan seseorang atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak, seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan, dan pendidikan. Di Indonesia, kemiskinan absolut diukur berdasarkan Garis Kemiskinan (GK), yaitu jumlah pengeluaran minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (setara 2.100 kilo kalori per hari) dan non-makanan esensial.

²⁵ Bappenas. (2020). *Laporan Pembangunan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. Hlm. 33.

²⁶ Soekanto, S. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hlm. 28.

²⁷ Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press. Hlm 87.

2. Kemiskinan Relatif: Jenis ini muncul akibat kebijakan pembangunan yang tidak merata dan menyebabkan ketimpangan pendapatan. Seseorang bisa dianggap miskin secara relatif jika pendapatannya lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pendapatan di lingkungannya, meskipun ia mungkin berada di atas Garis Kemiskinan absolut.
3. Kemiskinan Kultural: Kemiskinan kultural berkaitan dengan pola pikir, sikap, atau kebiasaan masyarakat yang cenderung tidak mau berusaha untuk meningkatkan taraf hidupnya.
4. Kemiskinan Struktural: Kemiskinan yang disebabkan oleh sistem sosial yang tidak adil. Dalam hal ini, kemiskinan adalah hasil dari struktur atau kebijakan yang tidak memungkinkan sekelompok masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia bagi mereka.
5. Kemiskinan Alamiah: Kemiskinan yang terjadi akibat kondisi lingkungan yang tidak mendukung, seperti lahan tandus yang menyebabkan produktivitas pertanian rendah.

Anak dari keluarga miskin adalah bagian dari kelompok rentan (*vulnerable groups*) yang berhak atas perlindungan dan afirmasi dari negara. Berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, negara wajib menjamin terpenuhinya hak-hak anak tanpa diskriminasi, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang layak.²⁸ Selain anak-anak, fakir miskin, dhuafa, lansia, perempuan dan ibu hamil, penyandang disabilitas, pekerja migran, masyarakat adat di wilayah terpencil, juga termasuk di dalam kelompok rentan. Banyak dari mereka yang kebutuhannya belum terakomodir oleh kebijakan pemerintah. Faktor lainnya seperti tindakan diskriminasi, minim akses informasi serta kesulitan menjangkau wilayah terpencil membuat kelompok rentan tersebut makin terperosok dalam kehidupan yang sulit. Lebih lanjut, anak-anak dari keluarga miskin yang tidak memperoleh gizi yang cukup beresiko tinggi mengalami

²⁸ United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: UN.

learning poverty atau ketidakmampuan memahami teks sederhana pada usia 10 tahun, yang akan berakibat pada keterlambatan tumbuh kembang dan penurunan produktivitas di masa depan.²⁹

Untuk melakukan penjangkauan bantuan sosial secara akurat, pemerintah menggunakan konsep desil. Desil membagi seluruh rumah tangga di Indonesia menjadi sepuluh kelompok yang masing-masing berisi 10 persen dari populasi, diurutkan dari yang paling tidak sejahtera hingga yang paling sejahtera. Pemerintah Indonesia menggunakan pemeringkatan desil sebagai basis data utama untuk penyaluran berbagai program bantuan sosial (bansos). Hal ini diatur secara formal melalui Keputusan Menteri Sosial Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga.³⁰ Kelompok desil 1 hingga 4 merupakan sasaran utama kebijakan perlindungan sosial di Indonesia. Berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), kelompok ini sering disebut sebagai 40 persen terbawah (*the bottom 40%*) yang memiliki tingkat kerentanan tertinggi. Klasifikasi konsep desil yang digunakan oleh pemerintah sebagai berikut:

a). Kelompok Prioritas

1. Desil 1 (Sangat Miskin / Miskin Ekstrem): Mencakup 10 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Secara statistik, kelompok ini mewakili sekitar 9,6 juta keluarga atau 28,7 juta individu. 1 Karakteristik ekonomi mereka ditandai oleh pendapatan yang tidak menentu, ketergantungan pada sektor informal sebagai pekerja bebas, serta keterbatasan aset produktif. 2 Rumah tangga desil 1 biasanya memiliki jumlah anggota keluarga yang lebih besar dari rata-rata nasional (di atas 4,78 orang) dengan tingkat pendidikan kepala keluarga yang rendah.
2. Desil 2 (Miskin): Kelompok ini berada sedikit di atas desil 1 namun pengeluarannya masih berada di sekitar garis kemiskinan nasional.

²⁹ UNICEF & World Bank (2021). *Stunting and Learning Poverty in Indonesia*. Diakses dari <https://www.unicef.org/indonesia> pada 15 Oktober 2025.

³⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2025). *Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 79/HUK/2025 tentang Penetapan Peringkat Kesejahteraan Keluarga*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

Meskipun mungkin memiliki sedikit aset, mereka tetap kesulitan memenuhi kebutuhan dasar tanpa subsidi pemerintah.

3. Desil 3 (Hampir Miskin): Kelompok ini sering kali tidak tercatat sebagai penduduk miskin dalam data BPS, namun posisi ekonomi mereka sangat rawan. Sedikit kenaikan harga bahan pokok atau biaya kesehatan yang tidak terduga dapat membuat mereka turun ke desil 2 atau 1.
4. Desil 4 (Rentan Miskin): Merupakan kelompok atas dari 40 persen terbawah. Mereka memiliki stabilitas yang lebih baik dibandingkan desil 1-3, namun masih dikategorikan rentan karena pendapatan mereka belum cukup untuk mengakumulasi tabungan atau investasi yang signifikan.

b). Kelompok Menengah dan Atas

5. Desil 5 (Menengah Bawah / Pas-pasan): Berada tepat di tengah distribusi kesejahteraan. Kelompok ini sering disebut kelompok "pas-pasan" karena pengeluaran mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar tetapi terbatas untuk kebutuhan gaya hidup atau tersier.
6. Desil 6 (Menengah): Memasuki kategori kelas menengah dengan kondisi ekonomi yang lebih stabil. Pola konsumsi mulai bergeser dari dominasi makanan ke arah barang dan jasa non-makanan yang lebih beragam.
7. Desil 7 (Menengah Atas): Memiliki pengeluaran di atas rata-rata nasional. Kelompok ini biasanya memiliki pekerjaan tetap di sektor formal atau usaha mikro-kecil yang stabil.
8. Desil 8 (Sejahtera): Bagian dari 20 persen penduduk teratas yang memiliki kapasitas finansial untuk investasi dan konsumsi barang tahan lama (durable goods) secara rutin.
9. Desil 9 (Sangat Kaya): Kelompok dengan tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, sering kali mencapai angka 10 juta hingga 20 juta per bulan menurut estimasi pasar.
10. Desil 10 (Super Kaya): Merupakan 10 persen penduduk terkaya yang memiliki akumulasi aset dan pendapatan tertinggi di Indonesia. Mereka

memiliki pengeluaran per kapita per bulan yang jauh melampaui rata-rata nasional.³¹

Penentuan desil rumah tangga ditentukan oleh beberapa faktor. Pertama, kondisi fisik tempat tinggal merupakan indikator utama dari tingkat desil. Variabel yang dinilai meliputi jenis lantai (misalnya ubin/keramik versus tanah/kayu berkualitas rendah), jenis dinding (tembok permanen versus kayu/bambu), serta akses terhadap fasilitas dasar seperti air minum bersih dan sanitasi yang layak. Kepemilikan aset seperti sepeda motor, mobil, mesin cuci, hingga jenis telepon seluler yang digunakan juga menjadi variabel pembeda antara desil rendah dan tinggi. Kedua, tingkat pendidikan anggota keluarga, terutama kepala rumah tangga, juga berpengaruh langsung dengan posisi desil. Rumah tangga di desil 1-2 mayoritas memiliki kepala keluarga yang hanya tamat SD atau bahkan tidak sekolah, sementara desil 8-10 didominasi oleh lulusan perguruan tinggi.

Selain itu, jenis pekerjaan juga menjadi penentu; mereka yang bekerja sebagai ASN, TNI, Polri, atau pegawai BUMN secara otomatis dikeluarkan dari kategori desil penerima bansos karena dianggap telah memiliki jaminan kesejahteraan dari negara. Ketiga, jumlah anggota rumah tangga dan rasio ketergantungan (jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan yang bekerja) sangat mempengaruhi pengeluaran per kapita. BPS mencatat bahwa rumah tangga miskin di Indonesia rata-rata memiliki 4,78 anggota keluarga, lebih tinggi dari rata-rata rumah tangga sejahtera.³² Semakin banyak tanggungan, semakin rendah pengeluaran per kapita, yang sering kali mendorong rumah tangga tersebut ke desil yang lebih rendah meskipun pendapatan totalnya mungkin terlihat cukup.

³¹ Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2024). *Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan pemanfaatannya dalam kebijakan perlindungan sosial*. Jakarta: Kementerian Sosial RI.

³² Badan Pusat Statistik. (2023). *Profil kemiskinan di Indonesia*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html> pada 13 Maret 2026.

1.6.4 Teori AGIL Oleh Talcott Parsons

Struktural fungsionalisme merupakan salah satu pendekatan utama dalam kajian sosiologi yang memandang masyarakat sebagai suatu sistem yang tersusun dari bagian-bagian yang saling berkaitan. Setiap bagian atau elemen dalam masyarakat memiliki fungsi tertentu yang berkontribusi terhadap keberlangsungan sistem sosial secara keseluruhan. Pendekatan ini menekankan bahwa keteraturan dan stabilitas sosial dapat tercapai apabila seluruh unsur dalam masyarakat bekerja secara harmonis sesuai perannya masing-masing. Struktur sosial yang meliputi nilai, norma, status, peran, serta lembaga sosial dipahami sebagai kerangka yang mengatur kehidupan sosial dan memberikan pedoman bagi perilaku individu. Struktur tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki fungsi sebagai penopang keteraturan, integrasi, dan stabilitas masyarakat. Teori ini berusaha menjelaskan hubungan sebab-akibat antara elemen-elemen sosial dan bagaimana setiap elemen tersebut berperan dalam menjaga keseimbangan masyarakat.³³

Salah satu tokoh penting dalam perkembangan teori struktural fungsionalisme adalah Talcott Parsons. Talcott Parsons mengembangkan kerangka pemikiran yang menekankan bahwa suatu sistem sosial hanya dapat bertahan apabila mampu memenuhi sejumlah kebutuhan fungsional tertentu. Menurutnya, masyarakat tidak hanya dipahami sebagai sekadar kumpulan individu yang hidup bersama, tetapi sebagai suatu sistem yang terorganisasi dengan baik. Sistem tersebut diatur oleh nilai-nilai, norma, serta pola hubungan sosial yang menjadi pedoman bagi individu dalam bertindak dan berinteraksi dalam kehidupan sosial. Dalam pandangan Parsons, setiap individu dalam masyarakat tidak bertindak secara bebas tanpa aturan, melainkan dipengaruhi oleh sistem nilai dan norma yang telah disepakati bersama. Nilai dan norma tersebut membentuk pola perilaku yang relatif stabil sehingga kehidupan sosial dapat berjalan secara tertib dan terarah.

Dalam perspektif ini, masyarakat sering dianalogikan dengan organisme hidup. Sebagaimana organ-organ dalam tubuh manusia saling bergantung untuk menjaga kelangsungan hidup, lembaga-lembaga dalam masyarakat seperti

³³ Ritzer, George, and Jeffrey Stepnisky. (2022). *Contemporary Sociological Theory and Its Classical Roots: The Basics*. Sage Publications. Hlm. 79

keluarga, pendidikan, agama, dan ekonomi juga saling berhubungan untuk menjaga stabilitas sosial. Ketika salah satu lembaga mengalami disfungsi, maka bagian lain akan terdampak, dan keseimbangan sosial pun dapat terganggu.³⁴ Teori Struktural Fungsionalisme turut serta mengkaji fungsi atau peran suatu institusi sosial ataupun struktur sosial serta tindakan sosial tertentu dalam suatu masyarakat dan mengkaji pola hubungannya dengan komponen-komponen sosial lainnya. Talcott Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial yang ada dalam masyarakat terdiri atas beberapa aktor individu, dimana aktor individu tersebut melakukan interaksi dengan individu lainnya secara terstruktur dalam suatu institusi atau lembaga.

Dalam pandangannya, Talcott Parsons kemudian merumuskan empat imperatif fungsional bagi sistem “tindakan” yaitu skema AGIL (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) sebagai sebuah sistem yang harus dimiliki oleh suatu organisasi atau lembaga. Dalam pandangan nya terhadap masyarakat modern, Parsons mengaitkan setiap fungsi AGIL dengan subsistem sosial tertentu, yaitu sistem ekonomi yang berfungsi untuk adaptasi, sistem politik atau pemerintahan yang berkaitan dengan pencapaian tujuan, sistem hukum atau institusi sosial yang berperan dalam integrasi, serta sistem budaya seperti pendidikan dan keluarga yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan nilai-nilai sosial.³⁵ Adapun rincian untuk keempat unsur tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. **Adaptation** (Adaptasi): kemampuan suatu sistem sosial untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekaligus memanfaatkan sumber daya yang tersedia guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Komponen ini merupakan prasyarat mutlak di mana sebuah sistem harus mampu mengenali, mengamankan, dan mengendalikan sumber daya dari lingkungan eksternal agar sistem tersebut dapat terus bertahan di tengah berbagai perubahan. Dalam kerangka AGIL, fungsi adaptasi terutama dijalankan oleh subsistem ekonomi. Sistem ekonomi bertugas mengatur

³⁴ Faroz, Andrian, Luthfi Salim, and Faisal Adnan Reza. (2025) *Implications Of Social Structure And Family Function In Early Marriage: A Structural Functionalism Perspective In Tanjung Harapan Village, Tanjung Raya, Mesuji*. Jurnal Analisa Sosiologi. Hlm. 479.

³⁵ Narwoko, Dwi. Suyanto. (2004). *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 350.

proses produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya yang diperlukan oleh masyarakat. Melalui mekanisme ekonomi, masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, seperti perkembangan teknologi, perubahan kebutuhan hidup, maupun pengaruh dinamika pasar.

2. **Goal attainment** (Pencapaian Tujuan): Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan suatu sistem sosial dalam menentukan tujuan bersama serta mengarahkan berbagai sumber daya yang ada untuk mencapainya. Sebuah sistem harus mampu mendefinisikan sasaran utamanya, menetapkan skala prioritas, serta memobilisasi segala sumber daya dan energi yang dimiliki demi mewujudkan tujuan tersebut. Fungsi ini terutama dijalankan oleh subsistem politik atau pemerintahan yang memiliki otoritas untuk menetapkan kebijakan, merumuskan program pembangunan, serta mengatur distribusi kekuasaan dalam masyarakat. Melalui lembaga politik, masyarakat dapat menentukan arah perkembangan sosial dan menetapkan prioritas tujuan yang ingin dicapai secara kolektif.
3. **Integration** (Integrasi): Integrasi merujuk pada kemampuan sistem sosial untuk mengkoordinasikan dan menyatukan berbagai bagian yang ada di dalamnya agar tetap berjalan secara harmonis. Fungsi ini menjadi elemen krusial yang mengatur, menyelaraskan, dan mengkoordinasikan hubungan para aktor di dalam suatu sistem sosial agar terhindar dari konflik yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Dalam kerangka Parsons, fungsi integrasi banyak dijalankan oleh sistem hukum, norma sosial, serta berbagai institusi yang berperan dalam mengatur hubungan antarindividu maupun antarkelompok dalam masyarakat.
4. **Latency** (Pemeliharaan Nilai-nilai): Fungsi ini berkaitan dengan upaya menjaga dan mempertahankan nilai-nilai budaya, norma, serta motivasi sosial yang menjadi dasar bagi keberlangsungan sistem sosial. *Latency* atau pemeliharaan nilai-nilai yang tersembunyi merupakan prasyarat sistem sosial yang berfokus pada bagaimana nilai-nilai luhur, norma, keyakinan, dan motivasi ditanamkan, dijaga, serta diperbarui ke dalam diri para aktor di dalamnya. Fungsi ini terutama dijalankan oleh institusi-institusi sosial

seperti keluarga, pendidikan, dan agama yang berperan dalam proses sosialisasi nilai kepada anggota masyarakat. Melalui proses tersebut, individu belajar memahami norma dan nilai yang berlaku sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan harapan masyarakat.³⁶

Dalam penelitian ini, permasalahan akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika sistem sosial yang melibatkan berbagai lembaga dan struktur masyarakat. Parsons melihat pendidikan sebagai salah satu institusi sosial yang berperan penting dalam menjaga keberlangsungan sistem sosial, khususnya dalam proses sosialisasi nilai, pengembangan kemampuan individu, serta pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Ketika sebagian kelompok masyarakat, khususnya keluarga miskin, menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, maka fungsi pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial dan pemerataan kesempatan menjadi tidak berjalan secara optimal.

Keterbatasan akses pendidikan tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga berpotensi mempengaruhi keseimbangan dan keberlanjutan sistem sosial secara lebih luas. Ketika sebagian kelompok masyarakat, khususnya keluarga miskin, menghadapi hambatan dalam mengakses pendidikan, maka fungsi pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial dan pemerataan kesempatan menjadi tidak berjalan secara optimal. Skema AGIL yang digagas oleh Parsons membantu menjelaskan bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan kelembagaan (organisasi) berperan dalam meningkatkan akses pendidikan anak dari keluarga miskin.

1.6.5 Kerangka Berpikir

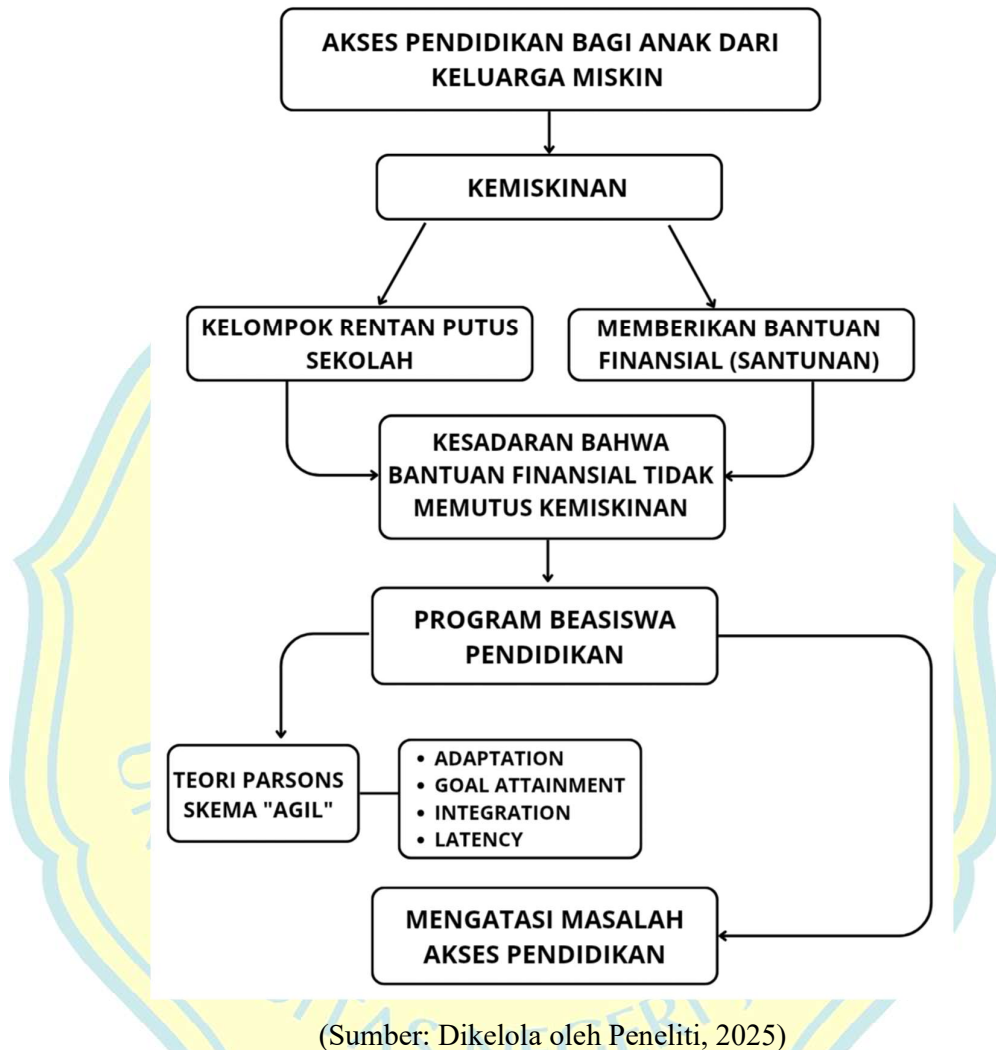
Berdasarkan definisi konseptual yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diketahui bahwa upaya dalam pemenuhan akses pendidikan bagi anak dari keluarga miskin seringkali terhambat oleh permasalahan struktural seperti kemiskinan. Kemiskinan secara langsung menciptakan dampak yang signifikan dirasakan oleh

³⁶ Ritzer, George. Goodman, Douglas. (2012). *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana. Hlm. 121-122.

masyarakat, yakni kelompok rentan dengan risiko putus sekolah. Permasalahan tersebut mendorong partisipasi organisasi sosial untuk memberikan bantuan secara finansial sebagai respon cepat. Namun, dalam perjalanannya, muncul kesadaran bahwa bantuan finansial tidak memutus kemiskinan karena intervensi berupa pemberian santunan tunai hanya bersifat sementara dan memicu ketergantungan. Yayasan Harapan Robbani melalui unit asrama GRAY kemudian merancang Program Beasiswa Pendidikan sebagai solusi strategis dan berorientasi jangka panjang.

Adapun penelitian ini untuk mengetahui secara empiris bahwa Program Beasiswa Pendidikan Yayasan Harapan Robbani telah berjalan secara optimal dan berkelanjutan berdasarkan Teori Parsons Skema "AGIL" sebagai pisau analisis temuan penelitian. Melalui empat fungsi utamanya yakni *Adaptation* (bagaimana pengelolaan dana pendidikan), *Goal Attainment* (ketepatan sasaran dalam mencapai target bebas putus sekolah), *Integration* (koordinasi antara yayasan dengan pihak sekolah), serta *Latency* (pemeliharaan motivasi dan pembinaan karakter anak asuh). Dengan terpenuhinya empat dimensi tersebut diharapkan program beasiswa pendidikan dapat berkontribusi dalam mengatasi masalah akses pendidikan sekaligus memutus rantai kemiskinan secara permanen.

Skema 1. 2 Mind Map Topik Penelitian



1.7 Metodologi Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, dengan tujuan untuk memahami makna yang muncul dari pengalaman individu atau kelompok dalam konteks sosial tertentu.³⁷ Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dalam konteks nyata, memahami makna yang dibentuk oleh subjek penelitian, serta menganalisis dinamika interaksi yang terjadi dalam pelaksanaan program beasiswa pendidikan.

³⁷ Creswell. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed). Sage Publications. Hlm. 4.

Melalui studi kasus, peneliti berusaha menggali lebih mendalam dan terperinci terhadap satu kasus khusus, yaitu Program Beasiswa Pendidikan GRAY - Yayasan Harapan Robbani tanpa bermaksud untuk menggeneralisasi temuan ke organisasi lain. Fokus utama nya adalah untuk memperoleh pemahaman secara menyeluruh mengenai upaya organisasi untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak yang bermukim di Graha Yatim dan Dhuafa (GRAY), terkhusus mereka yang berasal dari keluarga miskin dan beresiko putus sekolah.

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan.³⁸ Subjek penelitian berkaitan erat dengan di mana sumber data penelitian diperoleh. Pemilihan subjek dalam penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian kuantitatif. Dalam kualitatif, subjek terpilih menghasilkan informasi yang maksimum dan hasil tersebut tidak untuk digeneralisasikan.

Subjek dalam penelitian ini meliputi pihak internal yang secara langsung terlibat dalam penyelenggaraan Program Graha Yatim dan Dhuafa (GRAY), khususnya dalam aspek pelaksanaan program beasiswa pendidikan. Subjek terdiri atas pengurus yayasan, yaitu orang tua asuh yang membina dan berinteraksi dengan anak-anak mukim setiap hari nya. Orang tua asuh dalam hal ini akrab dipanggil Abi dan Umi bertanggung jawab langsung dalam proses implementasi program, seperti menyalurkan bantuan pendidikan, melakukan pendataan penerima manfaat, serta menjalin komunikasi dengan orang tua/wali peserta anak asuh, sekolah, dan donatur. Penerima manfaat dari program ini adalah anak yatim/piatu yang kehilangan salah satu atau kedua orang tua, serta anak-anak dari keluarga dhuafa yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan bertempat tinggal di asrama Graha Yatim dan Dhuafa (GRAY) Yayasan Harapan Robbani.

³⁸ Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV. Hlm. 32

Tabel 1. 2 Daftar Subjek Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Usia	Jabatan	Lama Bekerja	Unit Asrama
1.	Informan Kunci	Abi Rahmat	35 Tahun	Kepala Asrama dan Pengawas Program	15 Tahun	GRAY 4 Cempaka Putih
2.	Informan Utama	Abi Asep	35 Tahun	Kepala Asrama dan Orang tua asuh	2.5 Tahun	GRAY 2 Galaxy Bekasi
3.		Umi Ambar	30 Tahun	Pembina dan Orang tua asuh	2.5 Tahun	GRAY 2 Galaxy Bekasi
4.	Informan Pendukung	Abi Abdullah	37 Tahun	Kepala Asrama dan Orang tua asuh	10 Tahun	GRAY 10 Rawamangun
5.		Abi Darma	35 Tahun	Kepala Asrama dan Orang tua asuh	10 Tahun	GRAY 12 Pasar Minggu
6.		Umi Jannah	40 Tahun	Pembina dan orang tua asuh	10 Tahun	GRAY 12 Pasar Minggu

(Sumber: Dikelola oleh Peneliti, 2026)

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Pengambilan data penelitian dilakukan di beberapa unit asrama Graha Yatim dan Dhuafa (GRAY) - Yayasan Harapan Robbani. Kegiatan operasionalnya meliputi penyelenggaraan program asrama yatim & dhu'afa, program sekolah peduli yatim & dhu'afa, program santunan, layanan kesehatan, dan program UMKM masyarakat sekitar. Lokasi penelitian meliputi unit GRAY 2 Bekasi yang beralamat di Jl. Pulo Sirih Barat XI Blok FE 512 A, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Selain itu, penelitian juga dilakukan di tiga unit asrama lainnya, yaitu GRAY 4 Cempaka Putih yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Raya Barat No. 1B, Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat.

GRAY 10 Rawamangun yang beralamat di Jl. Pulo Asem Timur Raya No. 45, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulogadung, Kota Jakarta Timur; serta GRAY 12

Pasar Minggu yang beralamat di Jl. Gabus No. 19/20, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pengasuh asrama, yaitu Abi dan Umi, yang berada di setiap unit asrama Graha Yatim dan Dhuafa (GRAY) - Yayasan Harapan Robbani. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi secara akurat mengenai pelaksanaan program beasiswa pendidikan, pembinaan di asrama, serta kondisi anak asuh yang berada di masing-masing unit. Waktu pengambilan data penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober hingga Desember 2025.

c. Peran Peneliti

Guna mendapatkan hasil analisis yang mendalam, peran peneliti tidak sekedar mengumpulkan data yang dibutuhkan, tetapi juga bertindak sebagai perencana, pelaksana, hingga menentukan hasil akhir penelitian yang memungkinkan terbentuknya pandangan baru yang dapat di pertimbangkan pada penelitian selanjutnya. Peneliti juga berperan sebagai teman subjek dalam proses pengumpulan data, dengan menjalin hubungan baik agar tercipta suasana nyaman dan terbuka sehingga pengumpulan data dapat dilakukan secara akurat. Peneliti berusaha menjaga keseimbangan netralitas agar informasi didapatkan dan diinterpretasikan secara objektif serta menghindari bias personal.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Berdasarkan pemaparan pendekatan dan jenis penelitian, peneliti menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan dan riset studi kasus sebagai jenis penelitian, yang mana dalam pengumpulan data peneliti menggunakan berbagai sumber informasi, seperti wawancara, pengamatan, dan dokumen.³⁹ Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan langsung dari sumber utama serta data sekunder yang akan mendukung serta memperkuat data primer.

³⁹ Creswell. *Op. Cit.* Hlm. 146

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup observasi, wawancara, serta dokumentasi.

- **Observasi** adalah proses pengumpulan data langsung dari lapangan, di mana peneliti melihat dan memperhatikan keadaan subjek penelitian atau fenomena yang terjadi secara nyata. Observasi dapat memberikan pemahaman tentang apa yang terjadi dalam hubungan antara keluarga, komite, unit lingkungan atau tempat tinggal, sebuah organisasi besar atau sebuah komunitas. Observasi dipilih sebagai alat karena peneliti dapat melihat, mendengar, atau merasakan informasi yang ada secara langsung.⁴⁰ Untuk memulai observasi, pertama-tama peneliti menghubungi pihak Yayasan Harapan Robbani yang berada di Kota Cirebon melalui pesan *Whatsapp* untuk meminta persetujuan pengambilan data terkait program beasiswa pendidikan. Setelah nya peneliti diarahkan untuk berkoordinasi langsung dengan bagian admin unit asrama GRAY yang berada di Wilayah Bekasi dan Jakarta.
- **Wawancara** merupakan proses komunikasi atau interaksi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi melalui tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan untuk memperoleh informasi secara lebih akurat tentang isu atau tema yang diangkat, serta berfungsi sebagai proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh melalui teknik lain sebelumnya.⁴¹ Wawancara dengan subjek penelitian dilakukan secara langsung dan bertahap, dimulai dari asrama GRAY 2 di Bekasi, kemudian tiga asrama lainnya di Jakarta yakni GRAY 4 Cempaka Putih, GRAY 10 Rawamangun, dan GRAY 12 Pasar Minggu selama periode Bulan Oktober hingga November 2025.
- **Dokumentasi** adalah teknik pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang relevan untuk menunjang hasil

⁴⁰ Anggito, Albi. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak). Hlm. 110.

⁴¹ Sutopo. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS. Hlm. 72

wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan dokumen Laporan Penghimpunan dan Penyaluran Program Bulan Januari - Maret 2026

e. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan sebagai proses yang sistematis untuk mengolah dan memahami data lapangan yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data merupakan langkah untuk bekerja dengan data, mengorganisasikan informasi, mengelompokkannya ke dalam satuan-satuan tematik, lalu mengidentifikasi pola, makna, serta hal-hal penting yang dapat dijadikan dasar pemahaman. Miles dan Huberman menyatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif harus dilakukan secara terus-menerus sampai tuntas hingga data jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru.⁴² Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk menemukan hubungan antar kategori, menyusun pola temuan, menyaring informasi yang relevan, serta menarik kesimpulan yang dapat memberikan gambaran utuh mengenai proses dan hasil pemberdayaan anak yatim melalui bantuan pendidikan.

f. Triangulasi Data

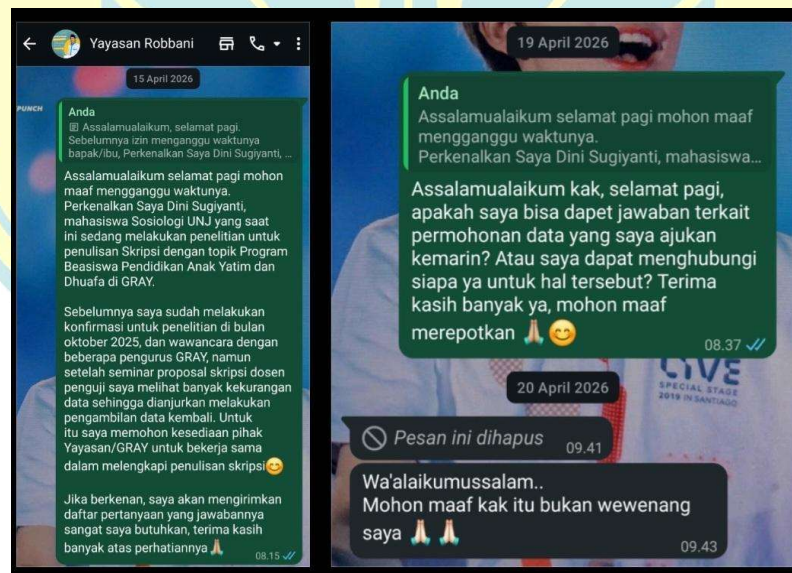
Triangulasi data adalah pendekatan analisis data kualitatif yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Selain mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian, peneliti juga menguji kredibilitas suatu data melalui berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi data bertujuan untuk mengecek hasil data yang diperoleh dari satu informan dengan informan lainnya. Peneliti melakukan triangulasi data dengan mencocokkan hasil wawancara dari informan kunci yakni Abi Rahmat sebagai salah satu pengurus yayasan yang telah bekerja selama 15 Tahun dan saat ini menjabat sebagai Pengawas, dengan 5 pengurus lainnya sebagai informan pendukung, yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program Beasiswa Pendidikan.

⁴² Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang metode-metode baru*. Penerbit Universitas Indonesia. Hlm. 34

1.8 Keterbatasan Penelitian

Dalam proses pengambilan data penelitian akses pendidikan bagi anak keluarga miskin di unit asrama Graha Yatim dan Dhuafa (GRAY) Yayasan Harapan Robbani, peneliti menyadari terdapat beberapa keterbatasan yang tidak dapat dihindari di lapangan. Keterbatasan-keterbatasan ini mencakup pembatasan subjek informan, aksesibilitas terhadap dokumen internal institusi yang bersifat rahasia, serta kendala teknis dalam proses konfirmasi data tambahan. Penelitian ini secara metodologis dibatasi hanya berdasarkan sudut pandang dan informasi dari pihak pengurus asrama GRAY Yayasan Harapan Robbani selaku pengelola program beasiswa. Peneliti tidak dapat melakukan wawancara secara langsung kepada anak-anak asuh selaku penerima manfaat utama bantuan pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan izin dan pembatasan akses yang diberlakukan oleh pihak manajemen Yayasan Harapan Robbani demi menjaga privasi serta kenyamanan anak-anak asuh mukim.

Gambar 1. 3 Upaya Peneliti Mendapatkan Data Penelitian Tambahan Melalui Humas Yayasan Harapan Robbani



(Sumber: Dikelola Oleh Peneliti, 2026)

Untuk data-data yang bersifat rahasia seperti rincian penggunaan dana pendidikan secara menyeluruh, Peneliti tidak dapat menampilkan pembukuan internal keuangan secara mendetail dan hanya dibatasi pada penggunaan hasil olah

data, statistik, maupun laporan tahunan resmi yang telah dipublikasikan secara terbuka melalui laman resmi Yayasan Harapan Robbani. Berdasarkan gambar diatas dapat terlihat upaya peneliti dalam mendapatkan data tambahan dengan mengirimkan beberapa pertanyaan tambahan mencakup sejarah ekspansi unit asrama GRAY, proses transformasi menjadi LAZ Provinsi, sistem pencatatan donasi dan laporan keuangan program pendidikan melalui admin Yayasan Harapan Robbani yang berada di Cirebon. Namun pihak Yayasan Harapan Robbani tidak kunjung memberikan jawaban maupun konfirmasi atas permohonan yang diajukan peneliti sebelumnya.

Beberapa hari kemudian, peneliti melakukan *follow-up* (konfirmasi ulang) terkait urgensi data tambahan tersebut. Dari komunikasi terakhir tersebut, pihak admin Yayasan Harapan Robbani menyatakan bahwa mereka memiliki keterbatasan wewenang untuk mengakses atau membagikan data keuangan internal kepada pihak luar. Peneliti mengalihkan sumber data dengan mengoptimalkan data statistik yang termuat dalam Laporan Penerimaan dan Penggunaan Donasi yang dipublikasikan secara resmi di laman resmi Yayasan Harapan Robbani. Langkah ini diambil agar analisis mengenai transparansi dan akuntabilitas program bantuan pendidikan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- **Bab I Pendahuluan:** Bab ini menjelaskan latar belakang penelitian dengan memberikan gambaran mengenai terbatasnya akses pendidikan bagi kelompok rentan, upaya pembangunan melalui pendidikan, rumusan masalah penelitian, pertanyaan penelitian yang akan dijawab, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta manfaat teoritis dan praktis dari penelitian ini.
- **Bab II Setting Lokasi Penelitian:** Bab ini menyajikan gambaran mengenai lokasi penelitian, yaitu Graha Yatim dan Dhuafa (GRAY) Yayasan Harapan Robbani yang berada di area perumahan Grand Galaxy City, Kelurahan

Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Pembahasan akan mencakup profil organisasi, visi, misi, program-program yang dijalankan, serta karakteristik subjek penelitian (kelompok miskin) sebagai penerima manfaat.

- **Bab III Temuan:** Bab ini berisi pemaparan temuan-temuan empiris yang diperoleh dari proses pengumpulan data di lapangan. Temuan penelitian disajikan secara deskriptif, mencakup data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan upaya peningkatan akses pendidikan formal di Graha Yatim dan Dhuafa (GRAY) Yayasan Harapan Robbani.
- **Bab IV Analisis:** Bab ini berisi hasil analisis berdasarkan temuan-temuan yang telah disajikan di Bab III. Analisis dilakukan secara induktif, mengidentifikasi pola, tema, dan kategori yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Hasil analisis temuan penelitian melalui Skema AGIL oleh Talcott Parsons, mengenai bagaimana program bantuan pendidikan dapat meningkatkan akses pendidikan formal anak dari kelompok miskin dan sebagai cara memperbaiki kualitas hidup.
- **Bab V Penutup:** Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh rangkaian penelitian, yang menjawab pertanyaan penelitian secara ringkas dan padat. Serta rekomendasi maupun saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi organisasi untuk lebih baik kedepannya.